

Konservasi Untuk Pembangunan

Sebuah Catatan Kecil dari Lapangan



Ir. Abu Bakar

Pengantar

Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA (Plt. Gubernur Bengkulu)

Ir. Wiratno, M.Sc. (Dirjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Hj. Drh. Dewi Coryati, M.Si (Anggota Komisi X DPR RI F-PAN 2009-2014, 2014-2019)

KONSERVASI UNTUK PEMBANGUNAN



Sebuah Catatan Kecil Dari Lapangan



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu

KONSERVASI UNTUK PEMBANGUNAN:

Sebuah Catatan Kecil Dari Lapangan

Ir. Abu Bakar

Editor

Dr. Suharno, S.Sos., M.Si.

M. Hilman T Sukma, S.Hut., M.ForEcosys.Sc.

Layout

Said Jauhari, S.Hut., M.Sc.

M. Hilman T Sukma, S.Hut., M.ForEcosys.Sc

Dicetak oleh

Balai Konservasi
Sumber Daya Alam Bengkulu

Sumber Dana

DIPA BA 029 TA 2018

Foto sampul oleh drh. Erni Suyanti

Kata Pengantar Penulis



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini akhirnya selesai disusun. Buku ini merupakan kumpulan dari catatan-catatan perjalanan, hasil kerja lapangan penulis selama dua tahun berkeliling ke kawasan-kawasan konservasi di Bengkulu sebagai Kepala Balai KSDA Bengkulu. Saya sebut “kerja Lapangan” karena esensinya BKSDA adalah petugas lapangan dan pengelola kawasan konservasi di tingkat tapak.

Ide membukukan catatan-catatan ini muncul ketika banyak berbincang dengan staf di BKSDA, terutama para staf muda. Mereka melihat bahwa kerja-kerja lapangan perlu didokumentasikan dengan baik, baik kerja lapangan para petugas lapangan hingga kerja lapangan seorang kepala balai. Sebelum buku ini terbit, telah ada tiga buku yang diterbitkan BKSDA hasil dari kerja-kerja lapangan para personil BKSDA. Buku pertama, *Burung Burung kepulauan Krakatau* yang ditulis oleh Sarifudin (PEH SKW III Lampung), *Pesona Wisata Bukit Kaba* oleh Davit Hutahayan dan Hayu Pratidina (PEH SKW I Curup), dan buku *Mengenal Anggrek TWA Bukit Kaba* yang ditulis oleh Hayu Pratidina dan Neli Yulia Nengsih (PEH SKW I Curup). Intinya, kami merasa tertantang untuk terus bekerja di lapangan dan juga mendokumentasikan hasilnya, baik atau buruk, dalam sebuah catatan kecil. Harapannya, tulisan ini dapat dibaca, dipelajari, diambil pelajaran darinya,

oleh para pihak yang berminat terutama para konservasionis muda Provinsi Bengkulu.

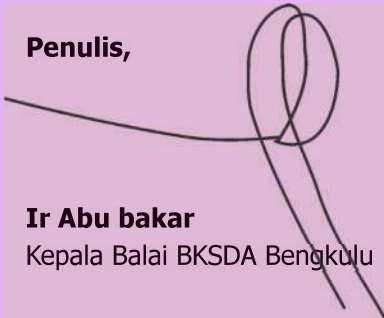
Buku ini memang ditulis pada periode akhir masa tugas penulis sebagai Abdi Negara di bidang kehutanan, konservasi secara khusus. Suasananya cukup emosional karena ini akan menjadi akhir masa pengabdian formal penulis. Dalam beberapa minggu terakhir, muncul beberapa testimoni dari sahabat dan teman baik. Dengan saran dari editor, beberapa testimoni itu juga penulis masukkan ke dalam buku ini.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi pengingat proses pelaksanaan program-program konservasi di Provinsi Bengkulu.

Penulis,

Ir Abu bakar

Kepala Balai BKSDA Bengkulu



KATA PENGANTAR **Pt. GUBERNUR**



Pola pembangunan ke depan harus diarahkan pada praktek-praktek pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang telah mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya secara ekstraktif harus ditinggalkan dan beralih pada pola-pola pembangunan yang lebih mengedepankan aspek perlindungan alam. Tidak dapat lagi pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan. Sebaliknya, praktek-praktek konservasi sumber daya alam juga tidak dapat lagi bergerak sendiri namun harus disinergikan dengan dinamika pembangunan nasional dan daerah. Kita harus mampu menyatukan langkah dan komitmen para pihak untuk memastikan perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem serta memastikan pertumbuhan ekonomi juga tidak terhambat.

Sinergi antara pembangunan ekonomi masyarakat dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan bagi kedua sektor vital tersebut. Salah satu hal yang mendasar dari keberhasilan sinergisitas adalah pola komunikasi yang baik, jujur dan terbuka antar stakeholders. Sinergi ini yang saya lihat berhasil dijalankan dengan baik oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu yang dipimpin oleh Ir. Abu Bakar ini. Dalam beberapa

tahun terakhir, sekat-sekat sektoral berhasil disingkap dan dihilangkan guna mendukung program-program pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Dalam buku ini anda akan membaca catatan-catatan kerja penulis selama dua tahun bertugas sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu. Walaupun wilayah kerjanya dua provinsi, yaitu Bengkulu dan Lampung, namun dedikasi penulis terhadap pembangunan Bengkulu tidak perlu diragukan. Beberapa program yang telah baik dilaksanakan seperti pengembangan pariwisata alam berbasis masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta konservasi flora fauna khas Bengkulu, perlu untuk terus dijalankan karena hal tersebut sangat relevan dengan program pembangunan Provinsi Bengkulu. Apresiasi yang tinggi pantas kita berikan atas karya-karya penulis di lapangan yang juga dituangkan dalam buku ini.

Sebagai penutup, selamat memasuki masa purna tugas kepada penulis. Saya ucapkan terima kasih atas pengabdian tugasnya untuk Provinsi Bengkulu selama beberapa tahun terakhir. Semoga jasa yang telah penulis sumbangkan untuk Pembangunan Provinsi Bengkulu mendapat balasan yang lebih mulia dari Allah SWT. Kepada pembaca saya mengucapkan selamat membaca, semoga buku ini dapat bermanfaat.



Dr. Rohidin Mersyah, MMA.
Plt. Gubernur Bengkulu

Kata Pengantar Dirjen



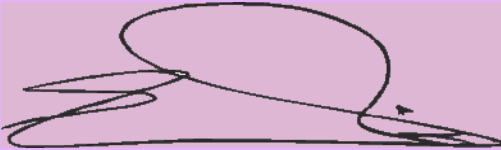
Penulis yang menjadi Kepala Balai KSDA Bengkulu periode 2016-2018 mencoba mendokumentasikan hasil-hasil kerja di lapangan penulis bersama tim selama dua tahun periode kepemimpinannya. Buku ini menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang dialami penulis ketika mendorong implementasi program-program konservasi di Provinsi Bengkulu. Banyak permasalahan yang ditemui oleh penulis seperti kerusakan ekosistem akibat pemanfaatan non prosedural, penataan kawasan yang belum tuntas dan pemanfaatan kawasan yang belum optimal.

Pengalaman keberhasilan maupun kegagalan sangat diperlukan dalam upaya membangun kesuksesan program di masa yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya alam hayati itu bersifat jangka panjang, maka akan diperlukan energi yang bertahan lama untuk menjalankan proses. Proses pendokumentasian hasil kerja merupakan hal penting dalam proses panjang tersebut. Organisasi Ditjen KSDAE termasuk BKSDA harus disiapkan untuk itu, disiapkan untuk menjadi *learning organization*. Penulisan catatan, buku dan sejenisnya menjadi penting.

Pengalaman yang penulis ceritakan dalam buku ini juga merupakan pengalaman kolektif dari tim BKSDA Bengkulu secara keseluruhan. Upaya penulis untuk membangkitkan kesadaran kolektif (*collective awareness*) dari petugas

BKSDA, dan kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah aksi bersama (*collective action*) merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi. Saya mengenal penulis sebagai pribadi yang giat bekerja, dan berpegang teguh pada pendiriannya. Hal ini penting sebagai modal menggerakkan perubahan dalam organisasi.

Kepada pembaca saya mengucapkan selamat membaca. Selamat memasuki masa purna tugas kepada penulis. Semoga jasa yang telah penulis sumbangkan untuk konservasi Indonesia mendapat balasan yang lebih mulia dari Allah SWT. Amin.

A handwritten signature in black ink on a light beige background. The signature is stylized and cursive, starting with a large loop on the left and ending with a small arrowhead pointing to the right.

Ir. Wiratno, M.Sc.

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kata Pengantar

Hj. Drh. Dewi Coryati, M.Si

Anggota Komisi X DPR RI F-PAN 2009-2014, 2014-2019



Bukanlah menjadi satu rahasia kalau satu di antara kekayaan yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan alamnya yaitu hutan dan bentang alam nan eksotis. Tidak hanya warga negara Indonesia saja, namun banyak wisatawan dari berbagai negara bahkan menyempatkan diri ke Indonesia hanya untuk menikmati kemegahan alam Indonesia yang tidak ada duanya. Bertandang ke hutan akan lebih mengasyikkan. Menikmati keindahan hutan ini semakin lebih baik lagi apabila dipadukan dengan aktivitas cinta alam yang lain, seperti bersih sampah, penanaman seribu pohon oleh pengunjung, dan program adopsi pohon (mengangkatnya menjadi pohon angkat yang akan dikunjungi lagi di kemudian hari). Merawat hutan berarti juga ikut berpartisipasi untuk memajukan ekonomi kreatif bidang pariwisata.

Pariwisata saat ini diharapkan dapat menjadi pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan mendongkrak penghasilan penduduk setempat secara cepat dan murah. Bagi negara, hal itu juga akan menjadi sumber keuangan dan fiskal pemasukan PDB (Produk Domestik Bruto) secara cepat dan murah. Dampak gandanya luar biasa. Dengan merawat kelestarian hutan,

kemudian membuat rumah pohon di antara kayu-kayu besar akan menjadi daya tarik luar biasa bagi pengunjung. Begitu juga gardu pandang atau jembatan kanopi yang menyeberang di antara kayu-kayu tua nan hijau seperti bermandikan limpahan oksigen segar dari alam akan menjadi kenangan tersendiri bagi wisatawan. Tempat wisata berbasis pariwisata kemasyarakatan seperti ini perlu juga dilengkapi dengan jalur trekking, *homestay*, gardu pandang, *camping ground*, pasar seni pertunjukan dan kuliner khas lokal, oleh-oleh khas buah-buahan dan *souvenir* bertema hutan dan juga fasilitas *outbond* atau permainan tempo dulu. Merawat hutan merawat akal sehat manusia untuk hidup berdampingan dengan alam yang lestari.

Dengan pola seperti itu, sebagai konsekuensinya maka hutan kita di Sumatera, dan tempat-tempat lain di nusantara akan menjadi lestari dan menarik untuk dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Mengembangkan obyek wisata hutan sosial kemasyarakatan jika dikelola dengan benar dan melibatkan desa dan komunitas serta Negara, maka akan berdampak kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Hutan yang sehat juga mampu menurunkan bencana. Curah hujan yang turun ke tanah akan terserap oleh pepohonan dan aneka ragam tanaman yang berada di dataran tinggi seperti gunung, lereng dan bukit-bukit, sehingga resiko terjadi banjir, erosi dan tanah longsor bisa teratasi. Hutan yang terkenal dengan istilah paru-paru dunia ini memiliki sejuta manfaat dan

menjadi sumber kehidupan bagi aneka jenis hewan (fauna) dan berbagai jenis tumbuhan (flora). Hutan merupakan penyumbang oksigen terbesar karena di dalam hutan banyak sekali terdapat aneka ragam pohon yang akan menyerap karbondioksida dan gas rumah kaca lainnya sehingga pemanasan global dapat ditekan sedemikian rupa.

Salah satu tugas pokok dan fungsi BKSDA yang dipimpin oleh Bang Abu Bakar Cekmat adalah mengelola Kawasan Konservasi antara lain Taman Wisata Alam (TWA). Bukunya banyak bercerita tentang Pengembangan wisata dalam TWA di Bengkulu yang dibagi menjadi 3 kategori sesuai potensi kawasan, letak, karakteristik dan Sosekbud masyarakat. Pertama, Pariwisata Alam berbasis masyarakat di TWA Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang. Kabar baiknya adalah BKSDA sudah membangun payung kerjasama dengan Pemda Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kapahiyang. Izin pengelolaan wisata pun sudah diberikan kepada masyarakat sekitar kawasan, contohnya untuk Masyarakat Desa Sumber Urip.

Kedua, pariwisata Alam berbasis komunitas di TWA Seblat dan TWA Air Hitam Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko. Komunitas tersebut bersama BKSDA membina masyarakat dalam pengelolaan wisata satwa liar terutama gajah dan penyu. BKSDA telah menjalin kerjasama dengan NGO (Non Governmental Orgination) dan perusahaan peduli lingkungan yaitu Yayasan Komunitas untuk Hutan Sumatera, Yayasan ASTI, Vesswic, Yayasan Berdiri Nusantara Sejahtera, Yayasan Sipef

Indonesia, PT. Alno Agro Utama dan PT. Agricinal.

Ketiga, pariwisata berbasis korporasi di TWA Pantai Panjang Kota Bengkulu. Dalam hal ini BKSDA mengajak investor untuk menanam modal di Bengkulu dalam bidang pariwisata alam. Salah satu nya PT. Noor Alief Bencoolen saat ini sedang mengurus ijin di BKPM. Namun terkendala oleh OPD Pemda yang seakan tidak mau menerima investasi di Bengkulu bisa jadi karena kemanfaatan untuk masyarakat dan lingkungan seputar lokasi belum dibicarakan dengan baik atau *win-win solution*.

Begitu pula untuk memajukan pulau terluar di Bengkulu yaitu Pulau Enggano dengan melakukan Evaluasi Kesesuaian Fungsi dari CA atau cagar alam menjadi TWA. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Pulau Enggano perlu bersama sama dan melibatkan masyarakat hukum adat Enggano. BKSDA telah kerjasama dengan para ketua dan pengurus adat 6 suku Enggano. Untuk itu perda hukum adat Enggano yang berperan melestarikan hutan dan pantai serta laut samudra perlu didukung semua pihak. Apalagi jika Enggano akan dijadikan tujuan wisata dunia. Apalagi apabila dipadukan dengan wisata sejarah, misalnya dipadukan dengan sejarah mengenai Sir Stamford Raffles yang berasal dari Eropa dan pernah tinggal di Singapura dan Bengkulu. Tentunya Wisata Enggano dan Bengkulu ini akan menarik bagi wisatawan dari Eropa atau pun dari Negara tetangga Singapura. Apabila hal ini terwujud, maka lengkaplah sudah upaya memajukan kelestarian alam dan peluang wisata guna memajukan Bengkulu, dan Indonesia

pada umumnya.

Sang penulis buku ini, Abu Bakar Cekmat adalah kakak kelas saya di IPB dengan fakultas yg berbeda (Saya fakultas kedokteran hewan, Abang ABC fakultas Kehutanan). Beliau adalah seorang alumni Fakultas Kehutanan (FAHUTAN) yang berprestasi dan kerjanya nyata bermanfaat buat memajukan pariwisata dan sumber daya alam negeri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Lampung dan Bengkulu. Buku yang ditulis oleh abang Abu Bakar Cekmat soal hutan dan pariwisata ini sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi saya di Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, dan Perpustakaan.

Selamat dan bangga untuk terbitnya buku ini, gerakan di lapangan sudah dikerjakan penulis, selanjutnya gerakan pemikiran melalui buku sudah pula ditunaikan. Lengkap sudah upaya yang dilakukan Abang Abu Bakar Chekmat dan akan menjadi amal jariah bagi penulis untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berkhidmat dunia akhirat!

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature appears to be 'Hya' followed by a dash.

Hj. Drh. Dewi Coryati, M.Si

Anggota Komisi X DPR RI F-PAN 2009-2014 dan 2014-2019

Daftar

Isi

iii - KATA PENGANTAR PENULIS - iv

v - KATA PENGANTAR Plt. Gubernur - vi

vii - KATA PENGANTAR DIRJEN - viii

ix - KATA PENGANTAR - xiii

xiv - DAFTAR ISI - xv

Bab I

17 - Pendahuluan - 23

Bab II

25 - Berkeliling, Menemukan Masalah dan Solusi di Lapangan
- 33

Bab III

35 - Membangunkan The Sleeping Tiger, Mempersiapkan
BKSDA - 42

Bab IV

45 - Mengubah Citra Penghambat Menjadi Pengungkit
Pembangunan - 50

Bab V

53 - Tiga Strategi Pengembangan Wisata Alam - 58

BAB VI

63 - Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan - 66

Bab VII

69 - Konservasi Enggano - 76

Bab VIII

79 - Konservasi Puspa Langka Bengkulu - 84

Bab IX

87 - Konservasi Berbasis Lansekap: Kasus Lansekap Kerinci Seblat - 94

Bab X

97 - Membangun Jaringan Kerja Sama Multi Pihak - 105

Bab XI

107 - Penutup - 109



AMANAH KONSERVASI DARI ANAK CUCU

BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BENGKULU

PRINSIP KELOLA KAWASAN

- 1 Sesuai dengan fungsi sebagai hutan konservasi
- 2 Bermanfaat untuk pembangunan daerah dan nasional
- 3 Bersama masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, LSM, dan individu peduli konservasi
- 4 Pemanfaatan yang berkelanjutan dan berkeadilan
- 5 Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

PRINSIP KENDALI TSL

- 1 Keselarasan antara pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan
- 2 Berbasis penelitian (*Scientific based decision making process*)
- 3 Kelestarian populasi TSL di habitat alami



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BENGKULU

Jl. MAHONI NO. 55 KOTA BENGKULU
TELEFAX (0736) 21987
www.bksdabengkulu.id

Konservasi alam bukan hanya "sekedar" pekerjaan. Ia adalah jalan hidup yang dipilihkan Tuhan untuk kita. Maka boryukurilah dengan cara bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas dalam menjalaninya.

[Dirjen KSDAE - Ir. Wiratno, M.Sc]

Petugas BKSDA adalah pjuang konservasi. Ayo kita laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan niatkan itu sebagai bentuk ibadah dan amanah konservasi dari anak cucu kita.

[Kepala BKSDA Bengkulu - Ir. Abu Bakar]

Bab I

Pendahuluan

Latar belakang

Sumber daya alam hayati memiliki fungsi dan peran vital dalam mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Tak berlebihan juga apabila sumber daya alam hayati menjadi penyokong utama pembangunan. Sumber daya hutan kayu pernah menjadi primadona pembangunan dengan penghasil devisa negara terbesar pada era-era awal pembangunan Negara ini, yakni dekade 60-70'an. Saat ini, pariwisata yang modal utamanya alam dan budaya menjadi andalan pemerintah dalam mendulang pendapatan negara non migas. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati harus dikelola secara lestari dan berkelanjutan guna memastikan keberlanjutan manfaatnya dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya alam hayati (SDAH) dilakukan oleh pemerintah dengan penuh kehati-hatian. Upaya konservasi SDAH dilakukan dengan menetapkan area-area tertentu sebagai kawasan hutan, kawasan konservasi dan tumbuhan satwa liar dilindungi. Kawasan hutan dibagi-bagi menjadi kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Hutan konservasi dibagi menjadi kawasan pelestarian alam (KPA), kawasan suaka alam (KSA) dan taman buru. KPA dan KSA kemudian dikenal juga sebagai kawasan konservasi. Secara total, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 120 juta hektar, dan hutan konservasi mencapai 24 juta ha. Kawasan hutan ini terdistribusi di seluruh wilayah NKRI.

Dalam mengelola kawasan hutan dan kawasan konservasi,

pemerintah menetapkan serangkaian aturan dan panduan pengelolaan. Pada intinya, pengelolaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kelestarian. Dalam prakteknya, pengelolaan kawasan hutan dan kawasan konservasi dinilai sangat kaku dan konservatif oleh sebagian pihak, terutama yang berada di luar “lingkaran” kehutanan. Pada spektrum sentimen yang paling negatif, bahkan kawasan hutan dianggap sebagai penghambat pembangunan.

Dari berbagai jenis tipe kawasan hutan, kawasan konservasi dinilai yang paling “sakral”. Banyak pihak beranggapan bahwa kawasan konservasi hanya boleh dilihat tak boleh disentuh. Meskipun kawasan konservasi tersebut memiliki beragam potensi. Kawasan konservasi dapat berbentuk taman nasional, taman wisata alam, suaka marga satwa, dan cagar alam, ditambah dengan taman buru. Cagar alam menjadi yang paling *strict*.

Tugas pengelolaan cagar alam, bersama taman wisata alam, suaka marga satwa dan taman buru diamanatkan pada BKSDA. Pada masa lalu, lebih dikenal sebagai PPA. Ketatnya aturan pengelolaan kawasan konservasi menjadikan pengelola kawasan memiliki ruang yang terbatas dalam mengespresikan ragam kreasi dan inovasi, apalagi yang menunjang dinamika pengembangan wilayah. Tak heran, pada akhirnya BKSDA yang dianggap hanya berfungsi sebagai penjaga kawasan dianggap sebagai penghambat pembangunan daerah.

Di Bengkulu, citra sebagai penghambat pembangunan juga tetap melekat pada BKSDA. Kawasan konservasi kelolaan BKSDA menjadi area terlarang yang tidak dapat diakses oleh pihak lain, termasuk pemerintah daerah. BKSDA Bengkulu sebagai pengelola dianggap eksklusif dan berada pada "alam" yang berbeda dengan komunitas di sekitarnya. Hal ini setidaknya benar berdasarkan penuturan berbagai pihak yang berkomunikasi secara blak-blakan dengan penulis.

Buku ini merupakan kristalisasi ide, gagasan dan dokumentasi hasil kerja lapangan penulis terutama saat bertugas sebagai Kepala Balai KSDA Bengkulu selama 2 tahun. Harapannya, melalui buku ini pembaca dapat memperoleh informasi dan bahan pembelajaran proses tentang bagaimana mengelola program konservasi, organisasi konservasi, serta mengarahkan tujuan program konservasi agar bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Lebih khusus lagi, penulis berharap buku ini dapat menjadi cerminan proses untuk dipelajari oleh para konservasionis muda di Provinsi Bengkulu.

Karena sifat sumber daya hayati yang harus bermanfaat dalam jangka panjang, kesuksesan program-program konservasi seringkali tidak dapat diukur dalam waktu singkat. Dua tahun yang penulis lakukan dalam menggawangi program konservasi di Provinsi Bengkulu dan Lampung tentunya sangat kecil sekali maknanya dibanding dengan tujuan jangka panjang sumber daya alam itu sendiri. Namun, setidaknya, apabila program-program konservasi yang penulis jalankan selama dua tahun ini dapat terus dilanjutkan, penulis menganggap bahwa telah

membantu meletakkan satu batu bata merah dalam bangunan besar konservasi di Provinsi Bengkulu dan Lampung.

Tugas pokok dan fungsi BKSDA

Sebelum membahas lebih lanjut beberapa isu, ada baiknya kita memahami tugas pokok dan fungsi Balai KSDA Bengkulu sebagai sebuah institusi pemerintah di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Balai KSDA Bengkulu mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Meskipun di Provinsi Bengkulu terdapat dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, namun keduanya dikelola secara mandiri oleh unit organisasi yang berbeda.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai KSDA Bengkulu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;

12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Konservasionis, konsisten, disiplin, religius. Saya menganggap pak Abu Bakar sebagai bapak pembangunan Balai KSDA Bengkulu.

Said Jauhari, S.Hut., M.Si -Koordinator PEH Balai KSDA Bengkulu-

Kawasan konservasi non taman nasional

Wilayah kerja Balai KSDA Bengkulu berada pada 2 provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Luas wilayah kerja yang mencapai 55.375,70 Km² terbentang sejauh lebih dari 600 km dari Kabupaten Mukomuko di utara, hingga Kabupaten Lampung Selatan di selatan. Dari luas daratan 55.375,70 Km² tersebut, terdapat 36 kawasan konservasi yang dikelola Balai KSDA Bengkulu, baik berupa kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru yang terdiri dari 27 cagar alam dan cagar alam laut, 6 taman wisata alam, 2 taman buru dan 1 kawasan pelestarian alam, dengan luas keseluruhan 84.203,11 hektar.

Bekerja di bidang konservasi itu cukup menyenangkan karena bisa bekerja sambil menikmati *travelling*. Hampir seluruh kawasan konservasi kelolaan BKSDA telah penulis kunjungi. Mulai dari Cagar Alam Muko-muko yang beradat di Muko-muko berbatasan dengan Sumatera barat, hingga Cagar Alam Kepulauan Krakatau di ujung selatan wilayah kerja. Dari Cagar Alam Danau Menghijau di Kabupaten Lebong, hingga Pulau Enggano di Samudera Hindia. Lebih dari itu, pengelola kawasan konservasi itu sudah seharusnya berada di lapangan, di kawasan itu sendiri. Tentunya, hal ini harus dimaknai secara objektif dan proporsional. Oleh karena itu, penguasaan terhadap lapangan menjadi mutlak untuk dimiliki pengelola mulai dari unit organisasi terkecil hingga pemimpin.



*Kunjungan kerja ke CA
Mukomuko di Mukomuko dan CA
Kepulauan Krakatau di Lampung*



Penguasaan terhadap lapangan hanya dapat dilakukan apabila kita sering ke kawasan hutan, tempat kita bekerja. Dengan seringnya kita ke lapangan, kita akan semakin sering melihat fakta-fakta lapangan, baik permasalahan yang terjadi, potensi yang ada, dan pola keterkaitan kawasan hutan dengan masyarakat sekitar. Pertama kali ke lapangan mungkin kita hanya mendapat gambaran umum, kedua kalinya akan mendapat informasi yang lebih mendalam. Ketiga kalinya, mungkin pemahaman kita terhadap pola relasi, dinamika permasalahan, dan aktor-aktor yang berperan dapat tergali dengan lebih gamblang. Informasi-informasi inilah yang sangat diperlukan dalam proses penyusunan keputusan yang objektif.



patroli udara kawasan konservasi bersama para mitra

Terlepas dari hobi penulis untuk turun ke lapangan, sebagai top manager, penulis berupaya juga memberikan contoh kepada seluruh personil di lapangan. Logikanya, apabila kepala balai mengunjungi satu kawasan 3-4 kali dalam setahun, kepala seksi harusnya 6-8 kali, kepala resort akan lebih sering lagi. Artinya, kepala *resort* akan menghabiskan 16 hari di satu kawasan. Sebagai informasi, satu resort di BKSDA bengkulu memiliki kawasan bervariasi antara 1 – 8 unit kawasan.

Suka tidak suka harus diakui bahwa pengelolaan kawasan konservasi yang selama ini kita lakukan belum mencapai tujuan pengelolaan kawasan yang dimandatkan. Belum lagi, terdapat permasalahan juga dalam penunjukkan kawasan yang tidak jelas tujuan/mandatnya. Hanya ada dua atau tiga kawasan yang memiliki mandat yang jelas dalam SK penunjukannya, yaitu

TWA Bukit Kaba sebagai kawasan wisata vulkanis, CA Danau Dusun Besar untuk perlindungan anggrek pensil, dan TWA Lubuk Tapi sebagai habitat rafflesia. Lain dari kawasan-kawasan tersebut, BKSDA mencoba untuk mengidentifikasi nilai penting kawasan dan menetapkannya sebagai tujuan pengelolaan. Misalnya, kawasan konservasi di Enggano difokuskan untuk perlindungan ekosistem mangrove dan satwa-satwa endemik enggano.

Tidak ada solusi tunggal

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis mengidentifikasi beberapa isu strategis pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Bengkulu. Permasalahan berkaitan dengan aspek

Bekunjung ke Enggano



penataan kawasan, perencanaan kawasan, kerusakan kawasan, sampai dengan pemanfaatan potensi kawasan yang belum optimal.

Permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan tumbuhan dan satwa liar bersifat kompleks, dan berkaitan dengan banyak pihak. Tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya. Setiap proses penentuan solusi harus diambil secara hati-hati dan bijaksana. Proses pengambilan keputusan harus memperhatikan faktor biofisik hutan juga faktor sosial ekonomi kemasyarakatan, politik dan faktor eksternal lainnya.

Permasalahan Penataan kawasan

Ibarat mengelola properti rumah, BKSDA itu hanya berperan sebagai “penunggu” rumah. Batas rumah sudah ditentukan oleh pemilik dan BKSDA tidak berwenang untuk merubah garis batas dengan tetangga kiri-kanan. Pun demikian dengan kawasan hutan. BKSDA “hanya” diamanatkan mengurus hutan, yang batasnya sudah ditentukan oleh instansi Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Celaknya, konflik lapangan didominasi oleh kasus yang berkaitan dengan batas kawasan dan proses pemantapan kawasan. Penetapan TWA Seblat mendapat protes dari 4 desa di sekitarnya dan 2 tetangga perusahaan. Area TWA Way Hawang berhimpitan dengan area transmigrasi. Proses enclave sebagian area kawasan CA Air Ketebat Danau Tes tidak terdokumentasi dengan baik sehingga luput dari proses pengukuhan kawasan.

Ada peluang penyelesaian masalah tata ruang kehutanan melalui mekanisme revisi tata ruang yang kewenangan pengusulannya ada di tangan Gubernur. Pemerintah daerah diharapkan dapat cukup sensitif menangkap permasalahan dan hambatan pembangunan yang berkaitan dengan kawasan konservasi, sehingga penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme revisi tata ruang.

Pemulihan ekosistem kawasan

Berdasarkan pengamatan langsung penulis di lapangan, banyak kawasan konservasi di Provinsi Bengkulu telah mengalami penurunan kualitas baik dalam tingkat ringan, sedang bahkan berat. Namun, beberapa kawasan masih memiliki ekosistem yang baik. Ekosistem dapat dikatakan baik apabila proses-proses ekologi dengan segala interaksi rumitnya masih berlangsung tanpa ada gangguan faktor eksternal, terutama manusia. Kerusakan muncul ketika adanya intervensi terhadap proses alam, dan lebih lanjut mengakibatkan penurunan kualitas jasa lingkungan yang diberikan.

Dibutuhkan serangkaian upaya untuk memulihkan kondisi ekosistem kawasan konservasi di Provinsi Bengkulu. Kegiatan pemulihan ekosistem seringkali diterjemahkan sederhana menjadi sebuah proyek penanaman atau reboisasi hutan. Namun, dinamika saat ini menunjukkan bahwa permasalahan telah meluas tidak hanya melulu tentang aspek kelola ekosistem, namun juga bagaimana mengelola kondisi sosial

dan politik di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena di banyak tempat kerusakan hutan terjadi disebabkan penguasaan lahan oleh sebagian masyarakat dengan pengorganisasian solid dan berjaringan luas.

Akhirnya, pemulihan ekosistem kawasan konservasi membutuhkan kerja bersama para pihak yang dimulai dengan dialog-dialog efektif dengan masyarakat, pengawalan dan pendampingan program serta pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan pemulihan. Kerja bersama ini melibatkan berbagai pihak mulai dari anggota dan tokoh masyarakat, pemerintah daerah dari mulai desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi, TNI dan Polri, akademisi serta lembaga swadaya masyarakat.

Diskusi dengan masyarakat delapan desa di Kepahiang



Pemanfaatan kawasan yang belum optimal

Tingginya potensi kepariwisataan alam di beberapa taman wisata alam belum dapat dikapitalisasi untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Butuh dukungan sarana prasarana yang lebih memadai guna mengoptimalkan potensi kawasan. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekowisata.

Selain potensi wisata, jasa lingkungan lain pun belum dikelola secara serius, misalnya air dan hasil hutan bukan kayu. TWA Bukit Kaba memiliki potensi jasa lingkungan air dan hasil hutan bukan kayu. Potensi sumber daya air TWA Bukit Kaba melimpah, terutama dalam aspek massa air. Air merupakan salah satu produk jasa lingkungan yang dihasilkan oleh kawasan hutan yang dapat menjadi nilai penting kawasan. Saat ini, sebagian masyarakat di sekitar kawasan sudah memanfaatkan langsung massa air yang bersumber dari dalam kawasan. Namun, pengelolaan pemanfaatan air dinilai belum mengendepankan asas kemanfaatan bagi kawasan hutan dan masyarakat.

Dibutuhkan penataan pemanfaatan sumber daya air TWA Bukit Kaba yang lebih berkeadilan. Selain itu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu terutama yang bersifat tradisional masih belum terkelola dengan baik.

Hari itu saya sedang membahas tentang kondisi hutan dan keberadaan industri di lahan hutan, dan beliau merespon langsung. Alhasil, saya bersama dengan kodim, polhut dan balai karantina berangkat melalui udara pake helikopter bksda, dan hasilnya memang ada...namun beliau selaku kepala bksda merasa itu harus kerjasama seluruh stakeholder demi meyelamatkan hutan dan habitatnya.

Satu lagi, berkat WA-nya tentang tahajud, kini saya rutin melakukan tahajud. Terimakasih Pak Abu, semoga kenangan dan pengalamannya selalu saya ingat.

Ingat hutan dan habitatnya, ingat pak abu. Ingat helikopter, ingat pak abu. Ingat tahajud, ingat pak abu. Semoga banyak orang-orang seperti pak abu yang Peduli alam selalu. Amin.

Iwan, Rakyat Bengkulu TV

Bab III

Membangunkan The Sleeping Tiger, Mempersiapkan BKSDA

Seperti telah dijelaskan pada Bab I, ketika berkeliling ke kawasan konservasi di Provinsi Bengkulu dan Lampung, penulis menemukan banyak potensi dan permasalahan berkaitan dengan program konservasi SDAE. Potensi hanya akan tetap menjadi “potensi” (sesuatu yang belum optimal pemanfaatannya) apabila tidak dikelola dengan baik. Permasalahan muncul bisa diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Potensi tidak optimal dikelola dan permasalahan tidak serius dan tuntas ditangani.

Sejak memimpin BKSDA Bengkulu pada Maret 2016, penulis berupaya membalik persepsi negatif terhadap BKSDA Bengkulu. Dari penghambat pembangunan menjadi pengungkit dan pendorong percepatan pembangunan wilayah Bengkulu. Dalam pelaksanaannya, penulis banyak menemukan hambatan. Hambatan pertama justru datang dari internal BKSDA. Pertama, perubahan struktur organisasi. Kedua, membangkitkan semangat kerja pegawai. Dibutuhkan upaya keras untuk menggugah aparatur BKSDA Bengkulu dari sekedar melaksanakan tugas rutin *business as usual* menjadi bekerja dengan *targeted output* yang jelas dan bermanfaat. Hal tersebut tentunya tidak sepadan dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Balai KSDA Bengkulu. Oleh sebab itu, tak berlebihan rasanya apabila penulis menganggap organisasi BKSDA Bengkulu seperti harimau yang sedang tertidur.

Menakhodai Dua Wilayah BKSDA: Lampung dan Bengkulu

Ketika memulai tugas sebagai Kepala Balai, sesungguhnya baru saja terjadi perubahan struktur organisasi yang sangat signifikan di tubuh BKSDA Bengkulu. Wilayah kerja Balai KSDA Bengkulu yang semula hanya meliputi Provinsi Bengkulu, bertambah luas dengan masuknya Provinsi Lampung sebagai wilayah kerja baru. Hal ini terjadi sebagai dampak dari plikuidasi Balai KSDA Lampung sebagai unit pelaksana teknis Ditjen KSDAE setingkat Eselon III, menjadi salah satu unit kerja setingkat eselon IV di bawah Balai KSDA Bengkulu. Terdapat tantangan besar dalam memadukan dua kelompok yang mulanya terpisah menjadi satu kesatuan organisasi yang saling mendukung dan bersinergi. Hal ini diibaratkan dengan upaya merajut dua rakit bambu yang semula terpisah, menjadi satu kesatuan yang kompak guna menerjang arus sungai yang deras di depan tujuan.

Cerita tentang BKSDA Lampung dapat ditarik kembali ke dekade 80-an ketika saat itu menjadi Unit Konservasi Wilayah II dengan wilayah kerja meliputi Sumatera bagian selatan. Provinsi Bengkulu menjadi salah satu wilayah kerja Unit Konservasi Wilayah II Tanjung Karang. Para petugas senior masih dapat menceritakan bagaimana mereka harus bersusah payah pergi ke kantor unit di Bandar Lampung untuk mengurus administrasi perkantoran. Zaman berganti, saat ini Bengkulu menjadi “pusat” dari unit kerja konservasi bernama BKSDA yang meliputi wilayah Bengkulu dan Lampung. Tak begitu jelas juga mengapa penulis ditunjuk untuk menjadi kepala pada unit

kerja yang baru saja “dikawinkan” paksa oleh Kementerian LHK ini. Namun, hal ini penulis nilai sebagai berkah karena dapat berkarya dengan cakupan wilayah lebih luas.

Menyikapi hal ini, terdapat beberapa hal yang dilakukan, yang menurut hemat penulis perlu dilakukan. Pertama, mendekatkan dua kelompok yang semula terpisah menjadi satu kesatuan “keluarga” BKSDA Bengkulu. Upaya ini dilakukan dalam kesempatan-kesempatan formal maupun informal. Kedua, membangun visi yang mudah dipahami bersama. Saat itu, dalam berbagai kesempatan penulis selalu mengingatkan bahwa visi BKSDA sebagai unit pelaksana teknis Ditjen KSDAE adalah memastikan kawasan konservasi terjaga dengan baik, dan peredaran tumbuhan dan satwa liar terkendali. Penulis ingin memastikan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh unsur pemimpin diorientasikan pada pencapaian visi ini. Ketiga, mengidentifikasi persoalan-persoalan secara partisipatif serta mencari solusi pemecahannya secara bersama. Dalam melakukan ketiga langkah ini, penulis berterima kasih pada para pejabat unit eselon IV, terutama bapak Mahfud sebagai Kasubbag TU, dan Bapak Teguh sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Lampung. Sebagai orang yang sama-sama “asli” Bengkulu dan Lampung, memudahkan mereka untuk menjadi jembatan penyatuan dua balai menjadi satu kesatuan utuh.

Membangkitkan semangat kerja di lapangan

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi adalah hadirnya pengelolaan di kawasan. Setiap kawasan harus

dijaga se-intensif mungkin dan se-maksimal mungkin. Hal ini dimulai dengan operasionalisasi unit organisasi UPT terkecil, yaitu resort. Dalam menunjang beroperasinya resort, terdapat beberapa hal yang dilakukan. Pertama, Rasionalisasi wilayah kerja dan struktur resort. Hingga awal tahun 2016, jumlah resort KSDA hanya berjumlah 11 resort. Sejak tahun 2017, resort wilayah KSDA dikembangkan menjadi 20 resort KSDA dan 4 Pos. pada tahun 2018, jumlah pos dikurangi menjadi tiga pos, yaitu pos Bandara Fatmawati, Pos Bandara Radin Inten, dan Pos pelabuhan Bakauheuni, Lampung.

Kedua, Mendistribusikan pegawai secara proporsional. Saat ini, 78% pegawai dialokasikan untuk melakukan tugas teknis yang menjadi tupoksi BKSDA Bengkulu. Proporsi pegawai tersebut tersebar di tiga seksi wilayah. Dari keseluruhan pegawai seksi wilayah, 60 – 86 % pegawai ada di KPHK, Resort, dan pos KSDA. Apabila dipersentasekan dari seluruh petugas BKSDA, 56% petugas ada di lapangan. Hanya ada sebagian kecil (22%) pegawai yang ditugaskan sebagai pendukung dengan penempatan pada Subbagian TU, termasuk para pejabat fungsional tertentu yang diperbantukan pada tugas lainnya. Apabila dianalisis lebih mendalam, hanya ada 12% pegawai yang mengelola urusan pendukung seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Ketiga, menyediakan sarana prasarana pendukung. Untuk mendukung operasionalisasi resort, berbagai sarana prasarana pendukung telah disediakan. Hampir seluruh resort memiliki kantor atau pos. Seluruh resort dan pos telah dilengkapi alat

transportasi, alat navigasi, alat komunikasi yang layak, dan sarpras pendukung lainnya.

Pembinaan dan penghargaan

Salah satu faktor penting pendorong perubahan adalah pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan penghargaan terhadap para pihak yang telah mampu berkinerja baik. Pembinaan dilakukan secara formal maupun informal. Pembinaan formal berbentuk forum-forum peningkatan kapasitas pegawai dan diskusi-diskusi dalam ruangan. Pembinaan informal yang paling penting adalah dengan memberikan contoh. Parameter waktu merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kedisiplinan. Mematuhi jam kerja baik bagi petugas di kantor maupun di lapangan adalah merupakan suatu keharusan. Walaupun fleksibilitas tetap berlaku terutama untuk petugas lapangan.

Sejak tahun 2017, diterapkan sistem penghargaan bulanan kepada unit atau kelompok kerja yang berkinerja baik. Terdapat beberapa kategori yaitu kategori KPHK, resort, kelompok pejabat fungsional, dan urusan. Pada tahun 2017, KPHK Bukit Kaba, Unit Polhut SKW II, Kelompok PEH SKW I, dan Urusan Program dan Kerja Sama menjadi unit/kelompok kerja terbaik pada masing-masing kategori.

Manfaatkan teknologi informasi

Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi keniscayaan sebagai penunjang aktivitas sehari-hari manusia. Teknologi informasi telah memungkinkan kita melakukan banyak hal hanya melalui ujung jari. Mulai dari memesan makanan, memesan ojek, bahkan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Demikian juga dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL), Balai KSDA Bengkulu memanfaatkan teknologi dan informasi untuk menghasilkan informasi yang akurat dan terkini sebagai penunjang proses pengambilan kebijakan pengelolaan Kawasan konservasi dan peredaran TSL. Data yang yang dibutuhkan harus bersifat terkini, mudah diperbaharui, dan menunjukkan kondisi aktual lapangan. Resort KSDA adalah organ BKSDA yang paling memungkinkan untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh para pembuat keputusan Balai KSDA Bengkulu.

Sejak 14 Maret 2018, seluruh kepala resort KSDA lingkup Balai KSDA Bengkulu dibekali ponsel pintar untuk memudahkan proses pengelolaan data informasi. Dalam ponsel tersebut disematkan aplikasi berbasis android yang dapat memudahkan petugas resort dan pos untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat dalam pelaksanaan tugas.

Pada tahap awal ini, aplikasi android yang disematkan berupa aplikasi Patroli dan Konfli Satli (baca: satwa liar). Aplikasi patroli berfungsi sebagai wadah informasi hasil patroli kawasan, seperti kondisi pal batas, perjumpaan tumbuhan satwa liar, temuan

tindakan ilegal. Selain itu, aplikasi ini juga mewadahi hasil patroli eksitu. Sementara itu, aplikasi konflik satli difokuskan untuk melaporkan kejadian konflik satwa liar dengan manusia secara lengkap, akurat dan cepat.

Petugas Pos KSDA yang berjaga dan memantau peredaran TSL di Bandara dan Pelabuhan dibekali dengan aplikasi Monitoring Peredaran Flora dan Fauna, yang fokusnya untuk memantau dan mengetahui jenis dan jumlah peredaran TSL melalui bandara dan pelabuhan di wilayah kerja BKSDA Bengkulu, yaitu Provinsi Bengkulu dan Lampung. Target hasilnya adalah diketahuinya jenis TSL yang trending dan potensi pelanggaran hukum.

Muara dari data dan informasi yang dikumpulkan oleh seluruh resort KSDA Bengkulu adalah adalah *Situation Room* yang telah terbangun sejak Tahun 2017 lalu. Harapannya, data informasi ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pimpinan demi organisasi yang lebih baik.

Abu Bakar Chekmat, seorang pemimpin yang menginspirasi. Beliau memegang teguh prinsip dengan mentalitas yang kuat tapi bersahaja.

Hampir seluruh kawasan konservasi BKSDA Bengkulu telah beliau kunjungi. Pak Abu Bakar mampu merubah kondisi kerja bawahannya yang semula statis menjadi dinamis sehingga mampu mendorong semangat kerja yang patut dibanggakan, mulai di kantor balai, seksi sampai ke resort-resort. Semua telah bekerja dengan baik dan telah menunjukkan prestasi kerjanya masing-masing.

Jaja Mulyana – Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA

Datang dengan cambuk api, Datang dengan pedang tajam
Bahkan mencambuk dengan pecutan api.

Kami hanya mampu terkejut, kami hanya mampu terbangun..
dan berlari tanpa arah.

2 tahun berlalu, 2 tahun terlewat.

Tak ada lagi marah, tak ada tertidur, tak ada lagi tertegun, tak
ada kesal, tak ada rasa lelah.

Hadir sekarang jiwa bertarung, jiwa bertahan, dan jiwa siap
hadapi tantangan.

Agung TJ, staf BKSDA Bengkulu

Seiring waktu, regulasi berubah dan aturan pengelolaan kawasan konservasi menjadi lebih akomodatif. Dinamika pembangunan menuntut kawasan konservasi untuk dikelola dengan lebih luwes. Berbagai peraturan baru membuka peluang pihak lain untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan. Beragam skema kemitraan dibangun baik melalui mekanisme perizinan, kerja sama, maupun pemberdayaan masyarakat. Namun, berbagai kebijakan baru sektor konservasi SDAE perlu dieksekusi dengan baik. Peristiwa di berbagai daerah telah banyak menunjukkan dampak negatif dari kebijakan baik bila tidak dieksekusi dengan baik. Dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan baru, dibutuhkan kepemimpinan yang lebih berpikiran terbuka sekaligus mampu berkomunikasi secara baik dan efektif.

Kawasan konservasi untuk kegiatan pembangunan non-kehutanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 2014, pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan adalah kegiatan yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara dan sarana komunikasi, transportasi terbatas dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional. Dalam peraturan Menteri tersebut, diatur bahwa permohonan kerja sama pembangunan strategis dapat diajukan kepada Menteri Kehutanan (saat ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan beberapa dokumen persyaratan, seperti proposal, citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 meter, peta lokasi,

rencana pembangunan sarpras, risalah umum kondisi kawasan, dokumen lingkungan, dan pertimbangan teknis dari kepala unit pengelola.

Dokumen yang persyaratkan sangat rigid dan membutuhkan waktu panjang untuk memenuhinya. Hal ini memang diperlukan karena bentuk-bentuk penggunaan kawasan konservasi selain untuk kegiatan konservasi tentunya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap mengedepankan aspek kelestarian kawasan. Hal ini kemudian akan menjadi alat verifikasi pengukuran nilai-nilai strategis dari program yang diusulkan.

Terdapat beberapa usulan kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan pada kawasan konservasi di Provinsi Bengkulu, seperti jalan melintasi CA Danau Dusun Besar di Kota Bengkulu, Jaringan listrik melewati CA Air Ketebat Danau Tes di Lebong, jalan kepahiang-rejang lebong melintasi TWA Bukit Kaba. Seluruhnya, harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian kawasan. Salah satu rencana lama dari Pemerintah Bengkulu adalah membangun Bengkulu *Outer Ring Road* yang melintasi Cagar Alam Danau Dusun Besar. Kebutuhan Pemprov ini bukan tidak mungkin diwujudkan, asalkan diwujudkan melalui proses sesuai aturan. Lebih dari itu, proses pembangunan harus atas persetujuan masyarakat sekitar kawasan. Artinya, masyarakat, yang notabene menjadi tanggung jawab langsung pemerintah daerah, harus diajak bicara. Poin berikutnya adalah perlunya jaminan bahwa pembukaan jalan tidak membawa dampak

lanjuta berupa pembukaan lahan di kanan-kiri jalan. Perlu dibangun batas fisik berupa pagar pembatas dengan area lainnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan tertutupnya akses terhadap lahan di area-kanan kiri jalan melalui pemasangan pagar.

Penulis memahami pentingnya upaya penanganan abrasi pantai dalam konteks mitigasi bencana. Abrasi pantai mengancam sejumlah jaringan jalan yang sangat penting dalam konteks evakuasi bencana dan sebagai pengungkit roda perekonomian wilayah. Upaya mitigasi bencana tidak dapat dikecualikan pada kawasan konservasi apabila ada potensi dampak bencana yang tidak dapat dihindarkan. Pada 500-an KM garis pantai Provinsi Bengkulu, terdapat 11 kawasan konservasi kelolaan Balai KSDA Bengkulu yang tersebar dari Muko-muko hingga Kaur. Kawasan konservasi pesisir ini didominasi oleh cagar alam, yaitu CA Muko-Muko I&II, CA Air Rami I&II, CA Air Seblat, CA Pasar Ngalam, CA Pasar Talo, CA Pasar Seluma, dan CA Air Alas. Berdasarkan Permenlhk Nomor 44 tahun 2017, pembangunan dam penahan abrasi dalam konteks penanganan mitigasi bencana dimungkinkan dilakukan melalui mekanisme kerjasama strategis yang tidak dapat dielakkan.

Pentingnya valuasi nilai ekonomi kawasan

Selain mendukung pembangunan secara langsung, seperti dimaksud dalam konteks pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, kawasan konservasi juga sebetulnya mendukung pembangunan secara tidak langsung. Satu

hal yang penting untuk dilakukan untuk mengukur peran kawasan konservasi terhadap pembangunan di Bengkulu adalah valuasi ekonomi kawasan-kawasan tersebut. Dengan melakukan hal ini, kita akan mengetahui nilai kuantitatif dari kawasan konservasi baik nilai langsung maupun tidak langsung. Beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk mengukur nilai ekonomi kawasan konservasi adalah dengan mengukur nilai pasar sumber daya yang ada di kawasan, dan mengidentifikasi angka kerelaan untuk membayar manfaat yang diberikan kawasan (*willingness to pay*). Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Sukabumi dan Bogor sering dijadikan contoh tentang bagaimana kawasan konservasi mampu menjadi penopang pembangunan wilayah. Kawasan ini menjadi hulu dari 3 daerah aliran sungai, yaitu Ciliwung, Citarum, dan Cimandiri. Kawasan ini juga menjadi pendorong utama wisata di daerah Puncak Bogor, sumber air bersih bagi sejumlah kabupaten/kota di sekelilingnya, serta penyangga areal budidaya strategis seperti perkebunan dan pertanian di areal di bawahnya.

Taman Wisata Alam Bukit Kaba di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang memiliki peran penting tidak hanya sebagai lokasi wisata, namun juga sebagai "tandon" air bagi area sekitarnya. Berdasarkan mandat penunjukkan kawasan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 166/Kpts-II/1986 tanggal 29 Mei 1986, nilai penting kawasan TWA Bukit Kaba berupa potensi objek wisata yang sangat menarik berupa kawah belerang, laut pasir dan sumber air panas, disamping memiliki potensi flora dan fauna yang beraneka

ragam. Terdapat beberapa air terjun yang tidak hanya memiliki wisata, namun juga memiliki potensi potensi massa air yang tinggi.

Dalam bab-bab berikutnya akan diuraikan bagaimana BKSDA terus berupaya mentransformasi diri menjadi lebih terbuka dan ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan wilayah. Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan adalah pengembangan pariwisata alam, pemberdayaan masyarakat, pembangunan pulau Enggano, konservasi bunga iconik bengkulu dan bagaiman mengimplmentasikan strategi konservasi berbasis lansekap.

Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian, kerjasamanya selama ini. Semoga semua karya dan bantuannya untuk pembangunan Kab. Kepahiang menjadi ibadah dan juga kenangan bagi masyarakat Kab. Kepahiang. “ Saya mengenal lebih dekat Sdr. Ir Abubakar Chekmat, ketika saya menjabat Kepala Bidang Pengusahaan Hutan, Kanwil. Dept. Kehutanan Prov. D.I Aceh tahun 1997-2000. Beliau seorang rimbawan yang “ low profile” dan tekun menekuni tugasnya di BKSDA Aceh. Lama tidak berkomunikasi, bertemu kembali saat beliau menjabat Kepala BKSDA Bengkulu. Orang pertama yang dia temui adalah saya di Kepahiang. Kami langsung berbicara substansi tentang pemanfaatan kawasan TWA Bukit Kaba untuk mendukung wisata alam dan pemeliharaan jalan di kawasan. Melalui serangkaian diskusi, konsultasi dan pertemuan dengan petinggi ke Kemen LHK. Alhamdulillah perjuangan dan fasilitasi pak Abu membuahkan hasil persis “last minute” menjelang dia pensiun. Sekarang sudah terbit Surat Dirjen KSDAE No. S.172/KSDAE/PIKA/KSA.O/3/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Persetujuan Kerjasama Pembangunan Strategis di TWA Bukit Kaba, Kab. Kepahiang, Bengkulu. Persetujuan ini sangat bermakna bagi bagi masyarakat Kab. Kepahiang untuk membuka konektivitas dari dan ke sentra produksi kopi, lada dan destinasi wisata alam. Semoga karya ini menjadi kenangan bagi pak Abu di masa purna bhaktinya. Doa kami semoga pak Abu dan keluarga senantiasa sehat dan berkarya pada ladang pengabdian yang lain. Aamiin YRA.

Hidayattullah Sjahid, Bupati Kepahiang (2016-2021), Seorang rimbawan

Bab V

Tiga Strategi Pengembangan Wisata Alam

Terdapat empat taman wisata alam (TWA) yang memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu TWA Bukit Kaba (Rejang Lebong dan Kepahiang), TWA Pantai Panjang (Kota Bengkulu), dan TWA Seblat (Bengkulu Utara dan Mukomuko), TWA Air Hitam (Mukomuko). Konsep pengembangan pariwisata alam disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

Ekowisata berbasis masyarakat

Sebagian kawasan TWA Bukit Kaba merupakan hutan hujan tropis khas pegunungan yang masih dalam kondisi baik. Kawasan ini masih menjadi habitat bagi beragam spesies dan komunitas flora fauna yang mungkin tidak dapat ditemui di tempat lain di Bengkulu termasuk jenis-jenis dilindungi dan

Orientasi Bersama pemda, Ditjen KSDAE, Masyarakat rencana pengembangan wisata



terancam punah. Kawasan ini memiliki nilai kultural tinggi berkaitan dengan tradisi spiritual nazar bagi masyarakat sekitar kawasan. Masyarakat sekitar percaya bahwa jika bernazar di sekitar Puncak Bukit Kaba maka permintaan mereka terkabul dan jika permintaannya terkabul mereka bayar nazar seperti berupa pelepasan sepasang burung dara dan pemotongan kambing. Selain itu, kawasan ini juga menyediakan sumber daya hasil hutan bukan kayu untuk dimanfaatkan secara lestari oleh masyarakat sekitar kawasan. Secara umum, masyarakat sekitar masih bercorak agraris.

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor tersebut, konsep wisata yang dikembangkan di TWA Bukit Kaba adalah ekowisata berbasis masyarakat. Menurut Fandeli (2000), ekowisata merupakan bentuk kegiatan wisata yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar, serta tidak membawa dampak negatif terhadap budaya masyarakat lokal.

Masyarakat diberikan peran untuk ikut berperan sebagai pengelola dan mendapat manfaat finansial secara langsung. Dengan melakukan ini, menurut Wibowo (2013), setidaknya ada tiga manfaat yang didapat. Pertama, kawasan tersebut mampu menghasilkan uang yang dapat dipergunakan untuk mengelola dan melindungi habitat dan jenis dalam kawasan. Kedua, kegiatan wisata yang berkembang memberikan peluang masyarakat sekitar kawasan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi; dan Ketiga, keuntungan secara ekonomi

tersebut akan menjadikan insentif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi kawasan.

Untuk menunjang pengembangan konsep ekowisata berbasis masyarakat ini, BKSDA telah menandatangani kerja sama pengembangan wisata alam dengan Pemerintah Rejang Lebong dan Kepahiang. Pemerintah kedua kabupaten ini secara arif dan bijaksana telah menyatakan dukungan pengembangan konsep ini. Bahkan secara bersama-sama telah menetapkan serangkaian rencana aksi untuk mewujudkan mimpi bersama ini. Pemda Rejang Lebong telah berkomitmen untuk memperbaiki jalan wisata, mempersiapkan *homestay*, dan mendorong kelembagaan masyarakat yang berorientasi wisata. Seakan tak mau kalah, Pemerintah Kepahiang pun berkomitmen akan membangun fasilitas wisata yang memadai di TWA Bukit Kaba blok Air Sempiang. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah suatu keharusan.

Ekowisata Urban (Urban ecotourism)

TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai mempunyai 3 formasi tipe ekosistem vegetasi penyusun, yaitu formasi cemara laut, formasi mangrove dan formasi hutan mangrove. Kawasan ini juga menjadi rumah bagi beberapa jenis satwa liar, yang keberadaannya semakin langka ditemui di perkotaan. Sebagai kawasan hutan, TWA Pantai Panjang menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang publik yang cukup lapang. Letaknya yang strategis di tengah kota Bengkulu menjadikan kawasan ini sebagai tempat ideal bagi masyarakat Kota Bengkulu untuk

berekreasi.

Konsep pengembangan wisata di TWA Pantai Panjang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan target pengunjung. Keberadaannya di tengah masyarakat kota Bengkulu mengharuskan wisata diarahkan pada sentuhan-sentuhan modernitas dengan fasilitas-fasilitas wisata yang representatif. Kawasan ini diharapkan mampu menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berwisata bersama keluarga, berkemah, *outbond*, dan pendidikan lingkungan. Diharapkan juga TWA Pantai Panjang mampu mendukung pengembangan industri MICE (*Meetings, Incentives, Conferencing, and Exhibitions*) di kota Bengkulu dengan menyediakan *venue-venue* berarsitektur unik dan ramah lingkungan.

Ekspose rencana pengembangan wisata di TWA Pantai Panjang di hadapan Dirjen KSDAE



Untuk mewujudkan konsep wisata tersebut, BKSDA Bengkulu tidak dapat mengandalkan 100% dana APBN yang terbatas untuk pembangunan. Pengelolaan wisata ke depannya pun harus dikelola secara profesional. Dibutuhkan kemitraan dengan sektor swasta untuk mengatasi permasalahan permodalan dan kendala sumber daya manusia pengelola.

Sebagai langkah awal, BKSDA Bengkulu sudah mulai berbenah. Tahun 2018 ini dibangun beberapa fasilitas wisata yang berorientasi pada pendidikan, yaitu camping ground dan mangrove track. Harapannya fasilitas ini dapat menunjang kegiatan-kegiatan kepemudaan di Kota Bengkulu dan menjadi media bagi pemuda-pemudi Kota Bengkulu belajar mengenai ekosistem Mangrove yang ada di sekitarnya. Lebih dari itu, kami berharap kawasan ini akan menjadi magnet baru untuk menarik wisatawan berwisata di kota Bengkulu.

Wisata minat khusus satwa liar berbasis kelompok relawan

TWA Seblat dan TWA Air Hitam berada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko. Kedua kawasan ini memiliki daya tarik wisata yang sangat unik yang kawasan lain tidak dapat menyaingi. TWA Seblat merupakan rumah bagi sekelompok gajah jinak dan habitat potensial bagi flora fauna asli Bengkulu. Nuansa alam liar akan menjadi daya tarik utama pengembangan wisata di kawasan ini. Untuk yang gemar menjelajah hutan rimba, kawasan ini akan menjadi tempat yang ideal untuk menghabiskan waktu. Tipe ekosistemnya cukup beragam, dari

hutan dengan pepohonan tinggi menjuntai, ekosistem padang rumput, hingga ekosistem sungai dapat dijumpai di kawasan ini. Plus, dapat merasakan sensasi berkeliling hutan sambil menunggang gajah.

TWA Air Hitam merupakan habitat alami dari berbagai jenis penyu. Terdapat 4 jenis penyu yang biasa mendarat di kawasan ini, empat jenis penyu, yaitu penyu hijau (*Chelonia mydas*), sisik (*Eretmochelys imbricata*), lelang (*Lepidochelys olivacea*) dan belimbing (*Dermochelys coriacea*).

Kedua kawasan tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki ekosistem yang sensitif terhadap kerusakan. Oleh karena itu, konsep wisata yang dikembangkan adalah wisata terbatas, dan berbasis kelompok sukarelawan. Wisatawan akan dipilih secara selektif dengan berbagai syarat dan ketentuan. Mengapa berbasis sukarelawan, karena kita membutuhkan tenaga-tenaga pendamping para wisatawan yang terlatih dengan penguasaan kawasan yang baik. Kita telah bekerja sama dengan para sukarelawan dengan cukup lama, contohnya adalah Kelompok Pemuda Pemudi Peduli Alam dan Lingkungan Hidup (KP3ALH) Air Hitam.

Di TWA Seblat dan TWA Air Hitam, kelompok sukarelawan dan pemuda menjadi aktor utama pengembangan wisata berbasis satwa liar (gajah dan penyu). Tahap demi tahap telah dilakukan dalam memastikan seluruh konsep ini bisa benar-benar operasional di lapangan. Yayasan Sipef Indonesia telah berkomitmen mendukung pengembangan wisata berbasis

konservasi penyu di TWA Air Hitam. BKSDA Bengkulu telah komitmen bekerja sama dengan Yayasan Komunitas Hutan untuk Sumatera dan Yayasan Berdiri Nusantara dalam mengembangkan ekowisata di TWA Seblat. Keberhasilan program ekowisata gajah di Tangkahan Aceh menjadi referensi pengembangan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya buat Bapak karena telah memperjuangkan apa yang selama ini kami harapkan yaitu pengelolaan TWA Bukit Kaba berbasis masyarakat.

Yadi, Kepala Desa Sumber Urip, Kab. Rejang Lebong

Saya atas nama Masyarakat Adat Bengkulu menghatur salam hormat dan terima kasih atas pengabdian yg tulus, lurus dan bijak. Dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian alam Bengkulu. Saya sampaikan secara khusus kesuksesan dan visi bapak membantu Bengkulu mencapai Wonderful 2020 menjadikan taman wisata alam untuk pantai panjang dan Danau Dusun Besar, dan bapak mengakomodir kearifan lokal dalam mengambil kebijakan pengalihan hak ulayat danau, pantai dan Hutan.

Kalau ada keciput mudik
Tandanya hari musim penghujan
Karena niat dan tujuan tuan yang baik.
Insyaallah di sampaikan Tuhan.

*Hormat dan salam masyarakat Adat Bengkulu.
Drs. H. S. Effendi, MS (Ketua BMA Kota Bengkulu)*

BAB VI

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan

Sumber daya yang dimiliki Balai KSDA Bengkulu dalam mengelola kawasan konservasi sangat terbatas. Baik sumber daya manusia, anggaran, waktu dan sarana prasarana. Dalam setiap *resort* KSDA, petugas hanya berjumlah 2 – 5 orang. Terlebih, petugas-petugas lapangan ini juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar terutama yang dilindungi meskipun di luar kawasan konservasi. Oleh karena itu, bekerja bersama masyarakat menjadi keharusan demi tercapainya keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi

Konsep dasarnya adalah bagaimana masyarakat terutama yang berada di sekitar kawasan juga turut serta untuk menjaga kelestarian kawasan hutan. Hal ini sebenarnya bukan konsep baru, karena konsep penyangga kawasan telah lama

Diskusi pengembangan wisata di desa Sumber Urip, Rejang Lebong.





Diskusi rencana pemberdayaan masyarakat di desa Sindang Jaya, Rejang Lebong.

digaungkan. Namun, pada banyak tempat hal ini hanya terbatas pada jargon semata, dan sulit diwujudkan. Hal mendasar dari konsep ini adalah masyarakat harus mendapatkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari keberadaan hutan. Selain itu, masyarakat juga harus diyakinkan bahwa kemanfaatan itu disebabkan oleh keberadaan hutan. Salah satu contoh manfaat dari keberadaan hutan adalah jasa wisata, air bersih, dan hasil hutan seperti aren atau komoditas lainnya.

Entri poinnya bisa melalui ekowisata, atau hasil hutan non kayu lainnya. Salah satu contoh program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah pemberian akses izin perusahaan jasa wisata alam dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Taman Wisata Alam Bukit Kaba kepada masyarakat desa Sumber Urip

dan desa Sindang Jaya Kabupaten Rejang Lebong. Penjajakan kesepahaman antara para pihak telah dibangun sejak tahun 2017 dan dideklarasikan dalam pertemuan di Kantor Bupati Rejang Lebong pada bulan Maret 2018 lalu.

Dengan Pemerintah Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang, Balai KSDA Bengkulu bersepakat untuk mengembangkan konsep pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat. Masyarakat akan diberikan akses untuk terlibat dalam pengelolaan wisata Puncak Bukit Kaba yang melalui pintu masuk desa Sumber Urip. Harapannya, kerja sama ini akan turut andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Balai menegaskan keberpihakan BKSDA kepada masyarakat sekitar TWA Bukit Kaba.

Balai KSDA Bengkulu juga membuka akses bagi masyarakat desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Kelingi untuk mengelola tegakan aren yang ada dalam Blok Tradisional TWA Bukit Kaba. Berdasarkan hasil inventarisasi potensi, terdapat sekitar dua puluh ribu batang aren yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang perekonomian masyarakat sekitar.

... Allhamdulillah di dalam tugas bapak, bapak sudah berani mengambil kebijakan, walaupun kami tau itu semua belum disahkan tapi Allah mengirimkan bapak untuk menyelesaikan konflik di 8 desa, untuk mensejahterakan kami, untuk membina kami, untuk merangkul kami dengan hati tulus ...

... Insyallah kami 8 kades akan mengarahkan mereka [masyarakat] untuk melestarikan hutan dengan menanam kayu buah-buahan yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari. kita akan sadar pentingnya lingkungan atau hutan kita ingin belajar untuk hidup beiringan dengan alam. hutan bagus kita bisa hidup di sana.

Terimakasih Pak, semoga bapak sekeluarga selalu dilindung Allah SWT, Amin. Kami 8 desa selalu mengingat perjuangan bapak...

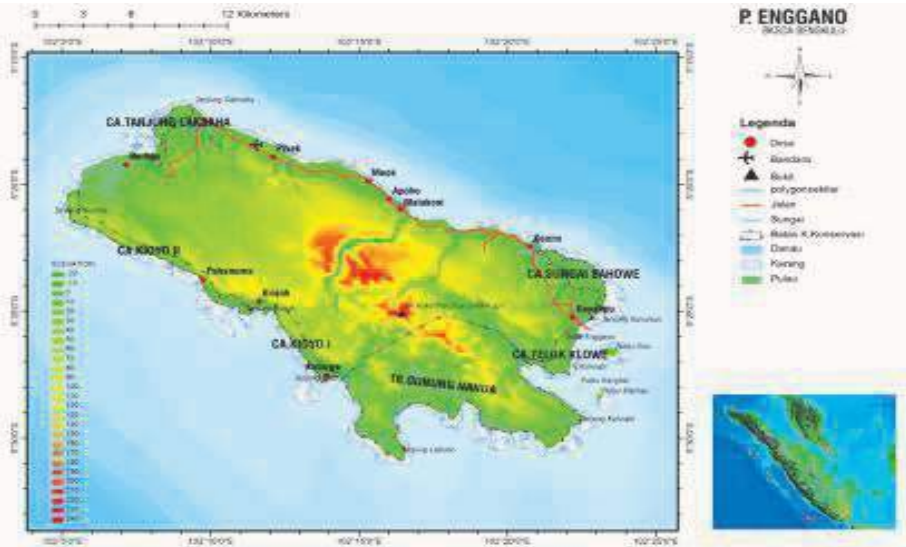
Kades Bandung Jaya, kab. Kepahiang.

Dulu, hubungan BKSDA dengan masyarakat kurang cair, seolah-olah ada jarak dengan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Pak Abu Bakar, BKSDA menjadi bersahabat. Kelebihan Pak Abu adalah kuat di bidang kemitraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terbukti dengan banyaknya MoU yang disepakati antara BKSDA dan kelompok-kelompok masyarakat.

Beliau berani menerobos pakem lama yang berfokus pada fisik hutan. Semenjak beliau memimpin, paradigma itu sepertinya berubah, yang menjadi subjek upaya-upaya konservasi bukan lagi hutannya tetapi masyarakatnya. Itulah revolusi terobosan terbesar beliau dalam mengubah paradigma rimbawan-rimbawan konservasionis yang beliau pimpin. Ini senada seirama dengan nawacita Presiden Jokowi.

Hefri oktoyoki, S.Hut, M.Si

Pemerhati kehutanan sosial-komunitas pecinta air terjun kab. lebong



Peta Kawasan Konservasi di Pulau Enggano

Merawat Enggano, Merawat Harmonisasi Empat Pilar

Pulau Enggano dengan luas 39.586,74 ha, merupakan salah satu pulau terluar dari Gususan Kepulauan NKRI. Garis pantai pulau ini mencapai 126,71 km, memanjang sejauh 35.60 km dari arah barat laut menuju tenggara dan melebar sejauh 12.95 km dari timur laut menuju barat. Pulau ini terpisah sejauh sekitar 120 km dari Pulau Sumatera.

Kawasan hutan negara memiliki porsi yang signifikan, mencapai 36% dari total luas pulau. Luas kawasan konservasi sendiri mencapai 22,06% dari total keseluruhan luas Pulau Enggano. Terdapat enam unit kawasan konservasi di Pulau Enggano,

yaitu CA Tanjung Laksaha, CA Sungai Bahewo, CA Teluk Klowe, CA Kioyo I & II, dan TB Gunung Nanu'ua.

Pulau Enggano merupakan daerah yang oleh BirdLife International dikategorikan sebagai Endemic Bird Area (EBA). Terdapat tujuh jenis burung endemik Pulau Enggano yaitu betet ekor panjang enggano, burung hantu enggano, burung kaca mata enggano, anis kembang enggano, uncal buau enggano, dan pergam hijau enggano, burung Beo Enggano.

Pulau Enggano juga merupakan area persinggahan bagi burung-burung migran. Tercatat terdapat 5 (lima) jenis burung migran yang singgah di Pulau Enggano. Kelima jenis burung tersebut adalah burung gajah besar (*Numenius arquata*), burung kecuit hutan (*Dendronanthus indicus*), trinil-lumpur asia (*Limnodromus semipalmatus*), cangak abu (*Ardea cinerea*) dan cangak merah (*Ardea purpurea*).

Terdapat setidaknya empat pilar utama dalam pembangunan Pulau Enggano. Keempat pilar tersebut adalah masyarakat adat, aparat sipil pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, dan pengelola kawasan lindung. Masyarakat yang mendiami Pulau Enggano adalah Masyarakat Adat Enggano yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Terdapat lima suku asli di Pulau Enggano yaitu Suku Kauno, Suku Kaahoa, Suku Kaharuba, Suku Kaitaro, Suku Kaharubi. Terdapat hukum adat yang unik di Pulau Enggano di mana seluruh pendatang di pulau itu diwadahi dalam satu suku tersendiri, yaitu Suku Kaamay. Hal ini menjadikan para pendatang menjadi bagian penting dari

sistem hukum adat Enggano.

Secara administrasi pemerintahan, Pulau Enggano merupakan satu unit pemerintahan kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara. Terdapat 6 desa dalam struktur pemerintahan Kecamatan Pulau Enggano, yaitu Desa Banjar Sari, Meok, Kaana, Malakoni, Apoho, dan Kahyapu.

Dalam Konteks pertahanan dan keamanan, Pulau Enggano merupakan area strategis mengingat letak geografisnya sebagai pulau terluar. Tak mengherankan apabila TNI/Polri menempatkan banyak personilnya di Pulau ini. TNI AD memiliki Kodim, TNI AL menempatkan Pos Lanal, Polri memiliki Polsek dan Pos Polairud di Pulau ini. Peran Personil TNI dan Polri sangat strategis dalam mendukung pembangunan Pulau Enggano.

Sebagai elemen terakhir, Balai KSDA Bengkulu memiliki peran sebagai pendukung dalam pembangunan Pulau Enggano. Balai KSDA Bengkulu berperan dalam mengelola kawasan konservasi sebagai sistem pendukung dan penyangga kehidupan masyarakat Pulau Enggano. Selain itu, Balai KSDA Bengkulu menempatkan diri sebagai perekat dalam harmonisasi hubungan para pihak kunci dalam pembangunan Pulau Enggano.

Salah satu bentuk nyata adalah fasilitasi kegiatan Musyawarah besar Adat Enggano yang dilakukan oleh Balai KSDA Bengkulu melalui KPHK Enggano. Musyawarah Besar Adat enggano ini merupakan kegiatan penting dalam adat istiadat Suku Enggano dimana Pa'Buki sebagai ketua lembaga hukum adat

mengumpulkan seluruh tokoh adat untuk membicarakan peraturan adat dalam tatanan adat istiadat suku.

Deklarasi Bersama Pelestarian Pulau Enggano: Mengelola Kawasan Konservasi Beyond Boundaries

Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2017, Masyarakat Adat Pulau Enggano mendeklarasikan komitmen bersama untuk penyelamatan dan pelestarian Ekosistem Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Deklarasi dilakukan oleh Kepala Lembaga Adat dan enam Kepala Suku Enggano serta disaksikan oleh penulis sebagai Kepala Balai KSDA Bengkulu, Camat Pulau Enggano, dan unsur TNI/Polri.

Deklarasi Pelestarian Pulau Enggano tidak hanya komitmen melestarikan Kawasan konservasi Pulau Enggano, tapi seluruh area pulau. Terdapat lima (5) butir deklarasi yang dibacakan oleh Pa'buki (Ketua Lembaga Adat) Enggano. Pertama, Masyarakat Adat Enggano bersepakat melakukan penyelamatan sumber daya alam dan ekosistem Pulau Enggano sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, sepakat untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan konservasi dari kerusakan. Ketiga, areal peruntukan lain (APL) atau areal masyarakat yang masih berhutan akan dikelola berdasarkan hukum adat dengan mengedepankan asas kelestarian serta menolak penanaman kelapa sawit. Keempat, sepakat menjaga dan melestarikan jenis tumbuhan dan satwa liar asli Pulau Enggano dari perburuan dan peredaran illegal. Kelima, sepakat

untuk menjadikan aspek kelestarian kawasan hutan sebagai bagian dari peraturan adat Masyarakat Adat Enggano.

Deklarasi penyelesaian pulau Enggano menegaskan komitmen masyarakat adat untuk kelestarian ekosistem pulau enggano. Menarik untuk melihat lebih lanjut bagaimana Pemerintah Daerah mengelaborasi modal sosial yang kuat yang dimiliki masyarakat Enggano ke dalam program-program pembangunan wilayah.

Peresmian kantor KPHK Enggano di Malakoni



Kelola kawasan konservasi Enggano sebagai satu kesatuan

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di tingkat lapangan, maka pada tahun 2016 dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Enggano. Operasionalisasi KPHK Enggano merupakan salah satu program prioritas Balai KSDA Bengkulu tahun 2017. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil, sarana prasarana, dan memperluas jaringan kerja. Sejak awal tahun 2017, telah ditempatkan 7 orang personil lapangan (Rasio personil terhadap kawasan 1:1.325 Ha). KPHK Enggano juga dilengkapi oleh 2 unit kendaraan roda empat, 1 unit kapal motor, 2 unit kendaraan roda dua. Sebelum kantor KPHK Enggano diresmikan, KPHK Enggano hanya difasilitasi oleh bangunan pos seluas 36 m². Dengan dibangunnya kantor KPHK Enggano, diharapkan pengelolaan kawasan konservasi di Pulau Enggano dapat meningkat.

**DEKLARASI PELESTARIAN DAN PENYELAMATAN PULAU ENGGANO
PROVINSI BENGKULU**

- Menimbang:**
1. Bahwa Pulau Enggano memiliki nilai penting bagi kelangsungan kehidupan Masyarakat Pulau Enggano;
 2. Bahwa hutan Pulau Enggano merupakan bagian penting dari sistem penyangga kehidupan Masyarakat Pulau Enggano;
 3. Bahwa kerusakan pada hutan Pulau Enggano akan meningkatkan resiko bencana bagi Masyarakat Pulau Enggano;
- Mengingat:** Keputusan Kepala Suku Masyarakat Adat Pulau Enggano Nomor: 02/KPS/Ka.S/E/2009 tentang Pengolahan Sumber Daya Alam, satwa, dan hewan serta pembukaan lahan, pengolahan dan pelestarian kawasan pesisir Pulau Enggano dalam upaya penyelamatan Pulau Enggano dari ancaman abrasi.

Oleh karena itu, Kami Masyarakat Adat Pulau Enggano menyatakan deklarasi bersama pelestarian dan penyelamatan Pulau Enggano sebagai berikut:

1. Sepakat melakukan penyelamatan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pulau Enggano sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sepakat untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan konservasi dari kerusakan;
3. Sepakat bahwa Areal Peruntukan Lain (APL) atau areal masyarakat yang masih berhutan akan dikelola berdasarkan hukum adat dengan mengedepankan kearifan lokal dan azas kelestarian, serta menolak dengan tegas penanaman Kelapa Sawit di Pulau Enggano;
4. Sepakat menjaga dan melestarikan jenis tumbuhan dan satwa liar asli Pulau Enggano dari perburuan dan peredaran *illegal*;
5. Sepakat untuk menjadikan aspek kelestarian kawasan hutan sebagai bagian dari peraturan adat masyarakat adat Enggano.

Demikian deklarasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku, Pa'buki, Camat Pulau Enggano, Kepala Balai KSDA Bengkulu, serta warga masyarakat adat Pulau Enggano sebagaimana daftar terlampir.

Pulau Enggano, 28 Oktober 2017

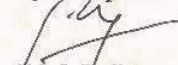
Kepala Suku Kaahoa



M. Jorri Kaahoa
Kepala Suku Kauno


Mulyadi Kauno
Kepala Suku Kaharuba


Zulkipri Kaharuba

Kepala Suku Kaitora


M. Rafly Zen Kaitora
Kepala Suku Kaarubi


Suwardi Kaarubi
Kepala Suku Kamay


S. Delis Manalu Kamay

Mengetahui,

Ketua Lembaga Adat Pulau



Ferdinand Kaarubi

Camat Pulau Enggano



Mariansius, S.Sos
NIP. 19650326 198602 1 002

Kepala Balai KSDA Bengkulu



Ir. Abu Bakar
NIP. 19600401 198403 1 004

Pak Abu Bakar merupakan sosok pemimpin yg luar biasa semangat untuk membangun konservasi melalui pemberdayaan masyarakat, sosok yg disiplin dan pekerja keras. Semangat membangun yang luar biasa dan tak mengenal usia dan batas akhir pengabdian. Balai KSDA Bengkulu khususnya wilayah kerja Rejang Lebong sangat bersyukur dapat dipimpin oleh Bapak. Kami dapat solusi yang cepat dan tepat untuk membangun konservasi di Bukit Kaba yang saling menguntungkan baik masyarakat, Pemda dan Kementerian LHK. Yang telah puluhan tahun sejak otonomi daerah kerjasama pembangunan Gunung Bukit Kaba tidak pernah terwujud.

Zulkarnain, Kepala Bappeda kabupaten Rejang Lebong

Terima kasih Pak Abu Bakar yang telah memberikan perhatian penuh dan mendukung masyarakat pulau Enggano untuk tetap menjaga kelestarian Pulau Enggano. Terima kasih Pak, Semoga sukses di tempat tugas yang baru. Yauwaika.

Marlansiun, Camat Enggano, Kab. Bengkulu Utara

Bab VIII

Konservasi Puspa Langka Bengkulu

Membangun komitmen bersama

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, semua jenis dari genus *Rafflesia* termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi. Di Provinsi Bengkulu, teridentifikasi 4 jenis *Rafflesia* yaitu *Rafflesia arnoldii*, *Rafflesia gadutensis*, *Rafflesia bengkuluensis* dan *Rafflesia hasselti*. Dari keempat jenis tersebut, *Rafflesia bengkuluensis* lebih banyak tersebar di luar kawasan konservasi. Salah satu contohnya adalah penemuan tahun 2017 lalu di lahan milik warga pada wilayah administratif Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Apresiasi terhadap Bupati Kaur yang berkomitmen untuk melakukan upaya penyelamatan dan pelestarian flora langka endemik Bengkulu yang juga merupakan ikon/maskot dari Provinsi Bengkulu. Namun demikian, Bupati Kaur mengharapkan dukungan Balai KSDA Bengkulu untuk berperan aktif dalam upaya konservasi bunga yang juga menjadi ikon Provinsi Bengkulu. Balai KSDA telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menggali opsi-opsi langkah penyelamatan habitat bunga tersebut yang tersebar di luar kawasan konservasi.

Berdialog dengan Masyarakat Pecinta Puspa Langka untuk Penyelamatan *Rafflesia arnoldii*

Telah banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mendeklarasikan sebagai kelompok pecinta puspa langka. Dengan semangat dan niat baik, kelompok-kelompok ini merupakan salah satu modal sosial yang berharga dalam implementasi program konservasi puspa langka di Provinsi Bengkulu. Yang perlu dilakukan elemen pemerintah adalah mengarahkan energi positif ini menjadi sebuah kekuatan gerakan masyarakat untuk keberhasilan program konservasi. Salah satu kelompok tersebut adalah Kelompok Pecinta Puspa Langka (KPPL) Bengkulu.

Rafflesia arnoldii di Taba Penanjung, Bengkulu Tengah





Pose Bersama selepas diskusi dengan kelompok pecinta puspa langka

Salah satu habitat penting bunga *Rafflesia* adalah hutan lindung Bukit Daun dengan luas 96.125 Ha, dan CA Taba Penanjung I dan II seluas 3,7 Ha. Jenis *Rafflesia* yang tumbuh di habitat ini adalah jenis *Rafflesia arnoldii* yang merupakan jenis dengan ukuran terbesar dari semua genus *Rafflesia*. Dalam sebuah dialog pada akhir tahun 2017 lalu dengan tema “Dialog Pelestarian Habitat Bunga *Rafflesia* Bersama Masyarakat di Kawasan Habitat *Rafflesia* Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah”, dilakukan perbincangan untuk meningkatkan kesepahaman para pihak terutama kelompok-kelompok pecinta dan pelestari bunga *Rafflesia* di Kec. Taba Penanjung, Bengkulu Tengah.

Hasil dari dialog ini disepakati komitmen bersama untuk menyatukan kelompok-kelompok pecinta dan pelestari bunga *Rafflesia* di Kec. Taba Penanjung, Bengkulu Tengah, dalam satu forum pengelolaan yang dilengkapi dengan perangkat peraturan yang disepakati Bersama. Peraturan yang akan dibuat harus dapat mengakomodasi hak dan kewajiban seluruh anggota forum. Harapannya, dengan terbentuknya forum para pencinta bunga langka, kegiatan kelompok-kelompok ini akan lebih terkoordinasikan dengan baik dan lebih efektif dalam mendukung pelestarian bunga *Padma*.

Konservasi berbasis riset

Minimnya kajian dan pengetahuan mengenai ekologi reproduksi tumbuhan ini membuat upaya konservasi bunga *rafflesia* ini masih menemui banyak hambatan. Upaya konservasi bunga *rafflesia* yang dilakukan Balai KSDA Bengkulu saat ini masih berfokus pada kawasan konservasi kelolaannya. Terlebih, upaya konservasi oleh Balai KSDA lebih banyak ditekankan pada aspek perlindungan dan pengamanan. Dibutuhkan lebih banyak kajian akademis mendukung upaya konservasi jenis bunga kebanggaan masyarakat Bengkulu ini.

Balai KSDA Bengkulu terus berupaya untuk menggandeng mitra guna meningkatkan efektivitas program konservasi bunga *rafflesia* dan habitatnya. Salah satu mitra yang digandeng Balai KSDA Bengkulu adalah Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB). Pada Tahun 2016, UMB ditunjuk oleh Kementerian LIngkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola kawasan hutan lindung seluas 2.000 ha sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus

(KHDTK). KHDTK yang berfungsi sebagai hutan pendidikan dan pelatihan terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah dan merupakan habitat esensial bagi bunga rafflesia.

Kesepakatan program konservasi bunga rafflesia dan habitatnya di hutan pendidikan UMB telah dijalin sejak tahun 2017 lalu. Terdapat beberapa arahan program yang disepakati. Diantaranya adalah kesepakatan untuk menetapkan spesies rafflesia sebagai spesies prioritas untuk diteliti yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyusunan rencana konservasi rafflesia di hutan pendidikan UMB. Digagas juga mengenai perlunya pengembangan ekowisata berbasis konservasi bunga rafflesia. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konservasi puspa langka ini akan dilakukan kegiatan pendidikan dan pembinaan terhadap komunitas pecinta puspa langka di sekitar kawasan serta melakukan pertemuan, diseminasi, atau *expose* hasil penelitian dan upaya konservasi bunga langka ini.

“Pak ABC, berdedikasi total dalam menjalankan tugas jg sangat religius, konsisten namun tetap bisa fun bersama”
Selamat menikmati masa purna tugas ya Kang. Berkunjung ke Bengkulu lagi dan lagi yaa. Salam

Endang Sigit. – Dosen Universitas Bengkulu

Tanpa terasa, sudah 2 tahun Bapak bertugas di Provinsi kami tercinta, Provinsi Bengkulu. Dalam 2 tahun ini begitu banyak hal positif yang Bapak lakukan untuk pelestarian, terutama untuk bunga Rafflesia dan PLG Seblat. Terima kasih Pak, Bapak sudah membawa kami ke level lebih tinggi dalam hal pelestarian Rafflesia dan Gajah Sumatera di Provinsi Bengkulu.

Di luar kedinasan, Bapak juga sangat aktif untuk bersosialisasi dan berteman ke setiap orang yang Bapak temui. Terima kasih Pak atas karya dan dedikasi yang Bapak berikan untuk Bengkulu Tercinta, You will be Missed.

Krishna (Alesha Wisata, Bengkulu Heritage Society, KPPL Bengkulu)

Bab IX

Konservasi Berbasis Lansekap: Kasus Lansekap Kerinci Seblat

Fragmentasi habitat merupakan salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan hidup satwa liar. Fragmentasi habitat berpotensi mengurangi luasan efektif yang tersedia untuk menunjang kehidupan kesatuan ekosistem pada daerah tertentu. Gajah yang memiliki area jelajah yang luas dengan kebutuhan pakan yang beragam merupakan salah satu spesies yang terdampak kuat oleh fragmentasi habitat (Sukumar, 2006). Hal ini memicu konflik antara manusia dan gajah yang mengakibatkan kerugian di kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil pemantauan berbagai pihak, populasi gajah bentang alam Seblat telah terfragmentasi menjadi setidaknya 4 kelompok kecil. Kelompok pertama adalah kelompok Air Teramang-Air Dikit. Kelompok kedua adalah kelompok Air Teramang-Air Berau. Kelompok ketiga adalah kelompok Air Ipuh-Air Teramang, dan yang terakhir adalah kelompok Seblat. Area jelajah kelompok yang terakhir adalah TWA/PLG Seblat dan HPT Lebong Kandis.

Penting untuk dilakukan upaya konservasi berbasis lansekap dengan menghubungkan TWA Seblat dengan blok hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tujuan utama rekoneksi habitat adalah menyediakan habitat yang cocok untuk keberlangsungan hidup populasi gajah. TWA Seblat yang memiliki luas 7.700 Ha tergolong kawasan yang cocok untuk mendukung keberlangsungan hidup populasi gajah sumatera. Kawasan TWA Seblat merupakan salah satu habitat yang menjadi tujuan migrasi kelompok-kelompok gajah di bentang alam Seblat. Namun, saat ini TWA Seblat terisolasi sehingga berada di luar

jangkauan kelompok-kelompok gajah di lanskap Seblat.

Secara historis, TWA Seblat merupakan habitat gajah. Secara reguler, kawana gajah di TWA Seblat bermigrasi ke utara karena area-area ini masih menjadi satu daerah jelajah kelompok gajah seblat. Namun sejak tahun 2016, gajah liar tidak ditemukan lagi di kawasan ini. Hal ini diyakini disebabkan oleh kawasan gajah yang telah keluar tidak dapat kembali ke TWA Seblat. Hal ini diyakini disebabkan oleh banyaknya halangan yang dihadapi gajah liar untuk kembali ke TWA Seblat.

Konsep koridor

Pembentukan koridor merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan fragmentasi habitat. Koridor akan memudahkan satwa-satwa liar untuk bergerak dari satu area ke area lainnya dalam home range mereka. Koridor satwa liar dapat berfungsi untuk menghubungkan kembali habitat-habitat yang secara historis pernah terhubung untuk memfasilitasi pergerakan satwa liar (Rameshan, dkk 2014). Hal ini diyakini dapat meminimalisasi resiko perkawinan antar kerabat dekat (*in breeding*), mendorong peningkatan keanekaragaman genetik, dan meningkatkan ketahanan hidup metapopulasi secara keseluruhan (Fahrig dan Merriam, 1994). Oleh karena itu, koridor satwa sangat penting untuk menghubungkan kembali kelompok-kelompok gajah yang telah terpisah secara spasial, serta untuk mendorong rekolonisasi kantong-kantong habitat yang telah ditinggalkan gajah.

Koridor yang dibentuk harus secara struktur dan fungsional terhubung. Agar koridor berfungsi, pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan preferensi dan hambatan (impedance) untuk satwa gajah. Kesesuaian habitat gajah ditentukan oleh beberapa faktor utama diantaranya ketersediaan pakan, sumber air dan topografi. Hambatan dapat berupa topografi dan keberadaan pemukiman. Koridor yang berfungsi adalah koridor yang menyediakan banyak kebutuhan gajah (pakan, air, dan topografi landai) serta memiliki sedikit hambatan.

Salah satu solusi yang mungkin ditempuh adalah integrasi pengelolaan lanskap Kerinci Seblat sebagai kesatuan habitat gajah. Untuk merealisasikan rencana penyelesaian masalah ini, telah ada inisiasi dan pertemuan antara Balai KSDA Bengkulu dengan beberapa lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Pusat Studi Lingkungan Universitas Bengkulu serta Jaringan LSM Akar Network, guna meningkatkan efektivitas pelestarian gajah sumatera pada bentang alam Kerinci Seblat.

Skema pengelolaan ekosistem esensial dinilai sebagai salah satu opsi dalam memfasilitasi terbentuknya koridor gajah sumatera di lanskap seblat. Kawasan ekosistem esensial adalah kawasan atau hamparan ekosistem penting yang memiliki nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi yang secara ekologis dan sosial ekonomi budaya penting bagi tujuan konservasi kehati. Salah satu bentuk ekosistem esensial adalah koridor satwa liar.

Fungsi utama koridor adalah memberikan ruang gerak untuk

satwa liar secara luas dalam melakukan perjalanan dan migrasi. Pemberian akses dan ruang gerak ini untuk menciptakan peluang pertukaran genetik antar populasi serta memberikan opsi pada suatu populasi tertentu agar dapat bereaksi terhadap ancaman dan perubahan lingkungan. Lebih dari itu, koridor juga dapat berfungsi untuk memberikan peluang rekolonisasi habitat yang populasi lokalnya telah punah.

Para Pihak Yang Terlibat

Pertemuan formal terakhir terselenggara pada tanggal 29 Maret 2018. Kegiatan ini difasilitasi oleh Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Ditjen KSDAE dan Balai KSDA Bengkulu. Turut hadir dalam diskusi ini adalah Dinas LHK, Organisasi Non-Pemerintah (Akar Network, Genesis, Lingkar Institute), sektor swasta (PT. Alno dan), media (Antara) dan Universitas Bengkulu. Selain para pihak tersebut, turut terlibat juga dalam diskusi inisiasi pembentukan koridor ini pihak lain seperti WCS-IP, Flora Fauna Indonesia, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Forum Konservasi Gajah Indonesia dan Masyarakat desa di area ekosistem esensial.

Progress Inisiasi Hingga Saat Ini

1. Telah teridentifikasinya kawasan ekosistem esensial habitat gajah pada lanskap kerinci seblat dan para pihak kunci terkait
2. Pada lanskap Seblat, telah teridentifikasi lanskap yang

memang penting bagi pelestarian gajah Sumatera. Kawasan yang teridentifikasi penting bagi pelestarian gajah di lanskap Bengkulu adalah HP Air Teramang, HP Air Ipuh, HP Air Rami, HPT Lebong Kandis, Area perkebunan PT. Alno Agro Utama, dan area sekitarnya. Identifikasi kawasan dilakukan berdasarkan data perjumpaan gajah selama periode 2009 – 2017. Telah teridentifikasi beberapa pihak yang dapat berperan penting dalam pelestarian gajah di lanskap seblat diantaranya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemegang konsesi HP dan HPT (PT. API dan PT. BAT), pemegang HGU perkebunan (PT. Alno Agro Utama), masyarakat desa sekitar, kelompok lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi. Proses identifikasi ini dilaksanakan pada pertemuan tanggal 18 Agustus 2017.

3. Telah terbangun satu kesepakatan para pihak akan pentingnya pengelolaan habitat gajah di lanskap seblat.
4. Kesepakatan untuk membentuk forum pengelolaan ekosistem esensial koridor gajah lanskap seblat. Forum kolaborasi pengelolaan disahkan oleh Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor S.497.DLHK Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera.
5. Penyusunan draft rencana aksi forum kolaborasi pengelolaan ekosistem esensial koridor gajah pada lanskap seblat. Lokakarya penyusunan draft rencana aksi dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017 lalu dan finalisasi dokumen dilakukan pada tanggal 29 Maret 2018 lalu.

Kesepakatan Rencana Aksi

Rencana aksi pengelolaan ekosistem esensial koridor gajah sumatera pada lanskap kerinci seblat akan difokuskan pada penyelesaian tiga isu strategis:

1. Bagaimana pengelolaan ekosistem esensial berdampak positif bagi masyarakat (kelola sosial)
2. Bagaimana pengelolaan ekosistem esensial berdampak positif pada eksistensi gajah dan kesejahteraan gajah serta flora fauna lainnya (kelola ekologi)
3. Bagaimana forum kolaborasi secara efektif menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga koordinasi (kelola kelembagaan)

Rencana Inovasi Pengelolaan : “Kampung Ramah Gajah”

Dalam mengelaborasi semua gagasan ke dalam bentuk konkrit kegiatan, diskusi penyusunan rencana aksi juga menyepakati untuk mengujicobakan konsep “kampung ramah gajah”/ Elephant-friendly village di desa-desa di lansekap seblat.



Akang Abu Bakar adalah sosok yang disiplin dan patuh pada aturan sehingga menjadi panutan bagi bawahannya.

Dr. Ridwan Nurazi, S.E.- Rektor Universitas Bengkulu

Pak Abu adalah kepala BKSDA yang berhasil menerapkan prinsip Kehutanan yaitu Hutan lestari masyarakat sekitar hutan bisa hidup dari hasil hutan non kayu. Selama ini beberapapimpinanBKSDA sebelumnya lebih mengedepankan tindakan pengamanan hutan cenderung represif melalui operasi Polhut. Sedangkan pak Abu lebih mengedepankan pencegahan dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan kerjasama. Sehingga masyarakat sekitar hutan ikut menjaga hutan karena masyarakat merasa hutan itu penting untuk mereka.

Koordinasi dan kerjasama dengan Pemda lebih intensif sehingga hutan konservasi tidak lagi dianggap begitu angker untuk ikut dikelola oleh masyarakat dan pemda. Sukses pak Abu. Semoga pekerjaan pak Abu dan kita semua berguna nantinya untuk masyarakat dan Pemda kab Kepahian ,dan menjadi amal kebaikan(amal jairiah) buat pak Abu,dan kita Semua. Aamiin ya Rab.

Ir. Ris Irianto, M.M. Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang

Bab X

Membangun Jaringan Kerja Sama Multi Pihak

Penyelenggaraan program konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Untuk menjalankan program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dibutuhkan biaya besar. Belum lagi, penggunaan anggaran pun belum sepenuhnya efektif. Dibutuhkan jejaring kerja yang tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga untuk masyarakat lainnya, akademisi, dan pihak swasta. Eksklusivisme hanya akan berujung pada kegagalan pencapaian tujuan program konservasi. Konservasionis tidak boleh lagi berfikir bisa melakukan sendiri dan seakan-akan terpisah dari realitas pembangunan yang terus bergerak dinamis. Sehingga dibutuhkan juga para pihak lainnya dengan latar belakang profesi yang beragam.

Untuk mengembangkan jejaring kerja yang solid, terdapat beberapa hal yang diperlukan. Pertama, membangun keterbukaan. Kedua, membangkitkan kepercayaan. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan konsistensi. Ketiga, formalisasi jejaring.

KERJA sama pengembangan wisata TWA Bukit Kaba

Balai KSDA Bengkulu telah menyepakati kerja sama lima tahun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang dalam mengembangkan pariwisata alam di Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Kesepakatan kerja sama dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama yang ditandatangani penulis dengan kedua Bupati Kabupaten tersebut.

Kerja sama dengan para pihak tersebut diarahkan dalam upaya optimalisasi fungsi Kawasan Bukit Kaba sebagai Taman Wisata Alam, terutama pada blok pemanfaatan. Kerja sama akan diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata alam; promosi dan pemasaran wisata alam; dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Pada tahun 2018, Pemda Rejang Lebong telah berkomitmen untuk membangun gazebo wisata dan memperbaiki jembatan menuju Puncak Bukit Kaba.

Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama pengembangan wisata TWA Bukit Kaba



Penulis menegaskan pentingnya sinergi antara Balai KSDA Bengkulu dengan Pemerintah Daerah karena BKSDA tidak mungkin mengelola kawasan TWA Bukit Kaba seorang diri, butuh kerja sama dengan multi pihak, terutama Pemerintah Daerah sebagai pemangku wilayah. Gayung bersambut, Bupati Rejang Lebong menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari upaya daerah memajukan dan mengembangkan wilayah. Beliau menyampaikan bahwa Pengembangan wilayah Kabupaten Rejang Lebong sangat berkaitan erat dengan sektor kehutanan, baik BKSDA, Balai TNKS maupun hutan lindung lainnya. Oleh karena itu, proses membangun harus disertai koordinasi intensif dengan pihak kehutanan.



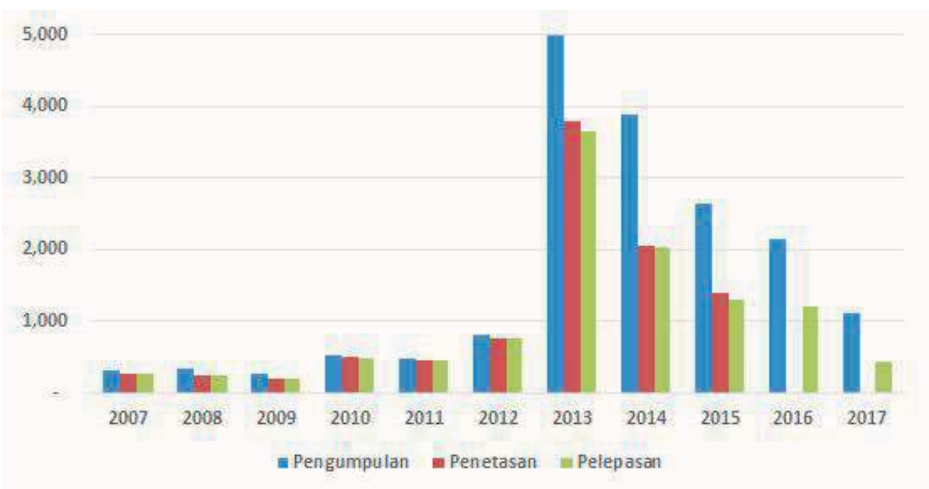
Tukik hasil penangkaran semi alami TWA Air Hitam

Kerja sama tiga pihak untuk konservasi penyu

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menyepakati kerja sama lima tahun dengan Yayasan Sipef Indonesia dalam mendorong pengembangan model konservasi penyu berbasis komunitas pemuda di Taman Wisata Alam Air Hitam, Bengkulu. Kerja sama antara sektor swasta, pemerintah dan masyarakat ini menjadi segitiga pengaman dalam memastikan keberlanjutan program konservasi penyu. Wujud nyatanya, akan dikembangkan Pusat Konservasi Penyu di Taman Wisata Alam Air Hitam, Kabupaten Mukomuko. Harapannya tidak sekedar mengkonservasi penyu, namun dapat menjadi daya tarik edu-wisata berbasis konservasi penyu. Kelompok Pemuda Peduli Alam dan Lingkungan Hidup (PK3AHL) Air Hitam

akan menjadi motor penggerak program ini. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan komitmen tiga pihak yang telah dibangun sejak lebih dari satu dekade lalu. Pada awalnya, komitmen terbangun antara Balai KSDA Bengkulu dan kelompok pemuda Desa Air Hitam. Pada tahun 2012, Yayasan Sipef mulai mendukung operasionalisasi program. Dalam satu dekade terakhir ini, hampir setiap malam kelompok pemuda Air Hitam melakukan patroli penyelamatan telur penyu di sepanjang lebih dari 10 km garis pantai Air Hitam.

Taman Wisata Alam Air Hitam sejak lama telah dikenal sebagai lokasi favorit pendaratan empat jenis penyu, yaitu penyu hijau (*Chelonia mydas*), sisik (*Eretmochelys imbricata*), lekap (*Lepidochelys olivacea*) dan belimbing (*Dermochelys coriacea*). Sejak tahun 2007, kerja sama multi pihak ini telah berhasil mengamankan tak kurang dari 17.000 butir telur di pesisir pantai Kabupaten Muko-muko. Sedikitnya sepuluh ribu tukik telah dilepasliarkan di TWA Air Hitam.



Conservation Response Unit (CRU) Seblat

CRU merupakan unit kerja yang beranggotakan personil BKSDA (polhut, pawang gajah, peh, TPHL), masyarakat dan gajah jinak. Gajah jinak merupakan elemen penting dari tim CRU. Program CRU merupakan kolaborasi BKSDA Bengkulu dengan mitra sejak tahun 2004. Berbagai pihak pun silih berganti menjadi mitra pendukung. Sejak tahun 2017, mitra pendukung program CRU adalah Yayasan Komunitas untuk Hutan Sumatera.

Saat ini, gajah binaan Balai KSDA Bengkulu berjumlah 12 ekor, yang terdiri dari delapan ekor betina dan empat ekor jantan. PLG Seblat didukung oleh 15 orang personil; 12 orang mahout dan 3 orang tenaga fungsional PEH dan Polhut. Seperti tak kenal lelah, para mahout selalu menjaga dan merawat gajah binaan di PLG Seblat. Aktivitas yang sudah menjadi rutinitas harian adalah: menggembalakan gajah, memberi pakan tambahan, dan memandikan gajah di Sungai Seblat. Dokter hewan juga tersedia untuk memantau kesehatan gajah binaan.

Seperti diketahui, pada mulanya program PLG hadir sebagai upaya penanganan konflik gajah dan manusia. Gajah yang "bermasalah" dibawa ke PLG untuk "disekolahkan". Gajah yang telah jinak kemudian digunakan untuk menangani konflik manusia dengan gajah liar, yang seringkali terjadi di areal perkebunan. Saat ini, gajah liar telah menurun populasinya, pemanfaatan gajah jinak menjadi tidak optimal. Pun demikian dengan pawangnya. Gajah yang terlanjur jinak sangat bergantung terhadap pawangnya, dan pawang menjadi sangat

“terikat” terhadap gajahnya. Pola relasi seperti ini sangat lemah dan sangat mudah kehilangan ikatan.

Filosofi dasar dari program CRU adalah bagaimana memberdayakan gajah jinak dan pawangnya. Pawang tidak hanya merawat gajah, tapi dilibatkan dalam patroli kawasan, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan menjadi bagian penting dalam pengembangan ekowisata. Pawang dikenalkan alat-alat survey terkini (GPS, misalnya) atau sistem pelaporan (komputer dan aplikasinya). Gajah pun tidak hanya menjadi *cost center*, namun dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai moda patroli dan ekowisata. Gajah binaan memiliki peran yang sangat penting. Gajah binaan merupakan salah satu moda transportasi unggulan dan mitra penting dalam melakukan patroli pengamanan kawasan. Memastikan keamanan kawasan merupakan hal mendasar mengingat kawasan ini merupakan habitat penting gajah liar dan harimau sumatera, dua spesies prioritas.



Mahout dan Gajah Jinak CRU Seblat (Foto oleh Bruce Levick)

Kang ABC, nama yang tidak akan pernah hilang sepanjang hayat. Beliau selalu hadir di setiap pukul 02.00 dini hari menemani kami. Berat untuk membalas salam beliau setiap malam karena rasa takut pada Allah SWT. Pada kesempatan ini saya sampaikan Terima kasih yang sangat dalam atas spirit dalam iman yang telah Kang ABC berikan.

Rustikawati – akademisi Bengkulu

Bab XI

Penutup

Catatan Akhir:
Akhir Adalah Awal Dari Sesuatu
Yang Baru

Sungguh tak terasa, tahun 2018 ini menjadi akhir dari masa pengabdian panjang penulis selama 32 tahun sebagai petugas kehutanan. Sebagian besar waktu tersebut, penulis habiskan untuk bekerja di bidang konservasi. Mulai dari Subbalai KSDA Aceh, Balai KSDA Aceh, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Balai KSDA Bengkulu. Setiap kali berpindah tugas, penulis dapat memaknai bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Tidak ada yang perlu dirisaukan atas berakhir suatu proses. Justru, ia akan menjadi peluang untuk bermula sesuatu yang lebih baik.

Memulai masa tugas di Bengkulu pada tahun 2016 merupakan awal baru dari berakhirnya masa tugas penulis di Ditjen RLPS selama 5 tahun. Penugasan baru selalu penulis anggap sebagai suatu berkah karena itu akan menjadi peluang baru perubahan. Tidak selalu tentang perubahan organisasi, namun juga perubahan dan perbaikan diri.

Bertugas di Bengkulu sungguh penulis syukuri dan nikmati. Di Bengkulu, banyak sekali permasalahan-permasalahan berkaitan dengan BKSDA yang menuntut penyelesaian cepat. Lebih bersyukur lagi, karena penulis melihat solusi terhadap permasalahan tersebut sudah ada, hanya perlu fokus dan penajaman langkah. Tidak hanya melulu mengenai substansi pekerjaan, penulis bersyukur karena memiliki banyak teman dan sahabat yang mau mendukung proses perbaikan. Beberapa teman sudah penulis kenal sebelumnya, namun banyak yang penulis kenal sejak di Bengkulu.

Penulis ucapkan terima kasih kepada para teman, sahabat, seluruh pegawai BKSDA bengkulu, serta pihak lainnya atas dukungan, saran, kritik, dan kerja sama yang sangat baik selama penulis bertugas. Permohonan maaf yang mendalam penulis ucapkan apabila selama berinteraksi terdapat khilaf dan kesalahan. Akhirnya, buku ini akan ditutup dengan sebuah puisi.

Ketika Ku Mati

Ketika ku mati
Jangan kau tangisi
Jangan pula kau tertawakan

Ketika ku mati
Jangan kau sebut-sebut kebaikanku
Jangan pula kau beberkan aib-aibku

Ketika ku mati
Jangan kau katakan Bajingan sudah mampus
Jangan pula kau ucapkan Penyayang itu telah tiada

Ketika ku mati
Biarkan berlalu dan tinggal kenangan
Biarkan ku pergi dengan amal dan dosaku
Biarkan ku menghadap kekasihku
Dengan caraku, dengan apa yang telah kuperbuat
Ketika ku mati
Ku hanya berharap
Kekasihku mau menerimaku kembali apa adanya
Ku berharap
kekasihku mau memaafkan atas salah dan dosaku
Dan aku masih diizinkan duduk disampingnya

Pak Abu adalah sosok pimpinan BKSDA Bengkulu yg Sukses, kinerja pelaksanaan anggaran dari dana DIPA mengalami kemajuan yg luar biasa dibandingkan kepemimpinan periode sebelumnya. Bapak selaku pimpinan bisa menjadi contoh bagi KPA Satker yg lain, khususnya dalam sinergi dan koordinasi dengan mitra kerja sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik.

Sukses buat Bapak, semoga Bapak bisa mewariskan sistem yg baik di BKSDA Bengkulu sehingga ke depan, siapa pun Pimpinan BKSDA Bengkulu tetap bisa menjadi yang terbaik dan contoh yg baik buat satker yg lain karena sistem yang bekerja efektif di samping leadership yg mumpuni dari pimpinan. Bravo BKSDA.


Bengkulu.

Haris Budi Susila - Kepala KPPN Bengkulu




Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu

Jln. Mahoni No. 55 Bengkulu | Telp/Fax: (0736)-21697
website: www.bksdabengkulu.id | Email: bksdabkl@gmail.com

 Balai KSDA BKL

 @BKSDA_Bengkulu

 @BKSDABengkulu